



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017 – 2022**



KATA PENGANTAR

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Satuan Kerja yang menangani urusan wajib pemerintahan dibidang pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pendidikan memiliki kewajiban menyusun Dokumen Perencanaan Strategis sebagai memberikan arah pembangunan bidang pendidikan di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dokumen Perencanaan Strategis ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Proses penyusunannya telah mengikuti tahapan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berbagai instansi dan pemangku kepentingan ikut dilibatkan pada proses penyusunannya dengan harapan Dokumen Perencanaan yang disusun nantinya merupakan kesepakatan berbagai pihak dan dapat di implementasikan dengan baik serta memberikan hasil yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan tahun 2017 – 2022 di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Semoga dengan adanya dokumen perencanaan strategis ini dapat memberikan arah pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pada akhirnya nanti dapat membuat layanan bidang pendidikan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik lagi.

Pangkalpinang, Februari 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640324 198903 1 008

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN	 8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	 8
2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	26
	30
 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	 33
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	33
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota	37
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	39
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	40

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	42
4.1. Tujuan dan Sasaran	42
4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran	44
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 46
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	51
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	51
6.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif	52
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	<i>Hal</i>
TABEL 2.1. Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin	21
TABEL 2.2. Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..	22
TABEL 2.3. Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Berdasarkan Golongan	23
TABEL 2.4. Jumlah SMA, SMK dan SLB	24
TABEL 2.5. Jumlah dan Kondisi Ruang Kelas dan Ruang Penunjang Lainnya SMA, SMK dan SLB	25
TABEL 2.6. Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
TABEL 2.7. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2018	26
TABEL 2.8. Target dan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Tahun 2018	28
TABEL 2.9. Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Pendidikan Tahun 2018	29
TABEL 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	34
TABEL 3.2. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan	35
TABEL 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	36
TABEL 3.4. Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014-2019	38
TABEL 3.5. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya	40
TABEL 4.1. Rumusan Tujuan	42
TABEL 4.2. Keselarasan Tujuan dan Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Bidang Pendidikan	43

TABEL 4.3. Sasaran dan Target Indikator sasaran	44
TABEL 4.4. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD	44
TABEL 5.1. Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Umum	49
TABEL 6.1. Program dan Jumlah Kegiatan	52
TABEL 6.2. Sasaran, Program/Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target dan Pagu Indikatif 2017 – 2022	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. PENDAHULUAN

Pembangunan Sumber Daya Manusia merupakan bagian proses dan tujuan pembangunan nasional termasuk juga bagian dari proses dan tujuan pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Memang disadari bahwa sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses keberhasilan suatu pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Karena sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan globalisasi dengan tingkat perubahan yang cepat dan radikal di berbagai aspek kehidupan manusia karena adanya teknologi.

Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu bentuk dalam pembangunan Sumber Daya Manusia, bahkan merupakan upaya yang utama disamping pembangunan bidang kesehatan. Pembangunan dibidang pendidikan bukan hanya sekedar pemerataan pendidikan saja, tetapi juga peningkatan kualitas serta relevansi pendidikan. Upaya tersebut yaitu seperti melakukan gerakan pendidikan anak usia dini serta penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah hingga pemberian kesempatan pendidikan tinggi bagi masyarakat.

Mengingat keterbatasan sumberdaya yang ada untuk pelaksanaan pembangunan, tentunya dibutuhkan sebuah perencanaan strategis pendidikan yang mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada sehingga menghasilkan hasil pembangunan bidang pendidikan yang optimal. Perencanaan strategis sendiri merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta

mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Dengan adanya perencanaan strategis pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan akan mampu memberikan arah pembangunan bidang pendidikan 5 tahun kedepan hingga tahun 2022.

Dalam Dokumen Rencana Strategis disajikan tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah sampai dengan rencana program dan kegiatan serta pendanaannya. Selama kurun waktu pelaksanaannya , penganggaran program dan kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan telah mendapat berbagai evaluasi antara lain evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain evaluasi dari pihak terkait, masih ada kegiatan yang dirasakan perlu dilaksanakan demi tercapainya pembangunan Pendidikan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Pasal 343 ayat 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila diperlukan dan/atau terjadi perubahan RPJMD. Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 ini yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
 13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 101 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Cabang Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 ini yaitu menyesuaikan arah pembangunan bidang Pendidikan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga peningkatan pembangunan bidang pendidikan dapat tercapai secara optimal berdasarkan analisis

kondisi terkini pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan segala sumber daya yang tersedia.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis ini yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran secara detail Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 untuk perencanaan pembangunan bidang pendidikan.
2. Sebagai alat pedoman untuk pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 ini disusun secara sistematis dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang perubahan penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menggambarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Bidang Pendidikan yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 – 2022 dalam rangka mengubah kondisi masa sekarang kearah kondisi yang diharapkan lima tahun mendatang. Tujuan dan Sasaran yang disusun merupakan penjabaran dari visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tujuan Strategis yang ingin dicapai yang dilengkapi dengan sasaran strategis yang merupakan tolok ukur dari tujuan strategis yang hendak dicapai, serta strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan strategis tersebut.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai strategi dan arah kebijakan untuk setiap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai beserta dasar-dasar analisis yang digunakan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini akan disampaikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang diambil untuk pencapaian tujuan strategis yang dilengkapi dengan pengukuran kinerja secara bertahap untuk setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan serta kelompok sasaran dari masing-masing kegiatan serta pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana program dan kegiatan.

BAB VII. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN****2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 5 (lima) kewenangan pada urusan wajib pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun Ruang lingkup kewenangan tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewenangan dalam hal :

- Pengelolaan Pendidikan Menengah
- Pengelolaan Pendidikan Khusus

b. Ruang Lingkup Kurikulum

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada ruang lingkup kurikulum memiliki kewenangan dalam hal :

- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal untuk Pendidikan Menengah.
- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal untuk Pendidikan Khusus.

c. Ruang Lingkup Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada ruang lingkup Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki kewenangan dalam hal Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.

d. Ruang Lingkup Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada ruang lingkup Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan memiliki kewenangan dalam hal :

- Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Untuk melaksanakan kewenangan ini, telah dibentuk Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

TUGAS :

Membantu Gubernur untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini, telah ditetapkan Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berikut adalah uraian struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

1. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan. Uraian tugas dan fungsi sekretariat sebagai berikut :

Tugas :

Membantu Kepala Dinas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Fungsi :

- Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kerjasama antar lembaga, serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
- Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus;
- Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus;
- Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan dan perbendaharaan di lingkungan dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus;
- Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dan pengelolaan dana dekonsentrasi di bidang pendidikan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karir pendidik, *penyiapan bahan*

rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah kerja sama, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;

- Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada sekretariat terdapat 3 unit tugas, yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan. Adapun uraian dari unit tugas tersebut yaitu sebagai berikut :

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Adapun uraian tugas dan fungsi dari Subbag Umum dan Kepegawaian yaitu sebagai berikut :

Tugas :

Membantu Sekretaris melaksanakan Penataan administrasi umum perkantoran, Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran, Penataan dan pengembangan Organisasi dan Penataan kepegawaian serta disiplin pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Adapun uraian tugas dan fungsi dari Sub Bagian Keuangan yaitu sebagai berikut :

Tugas :

Membantu sekretaris melakukan penatausahaan keuangan, di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan, Kerjasama antar Lembaga dan Tugas Pembantuan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Adapun tugas dan fungsi Sub Bagian Perencanaan yaitu sebagai berikut :

Tugas :

Membantu sekretaris melaksanakan penyusunan Perencanaan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan serta melaksanakan kerjasama antar lembaga dan tugas pembantuan bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. BIDANG PEMBINAAN SMA

Bidang Pembinaan SMA dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bidang Pembinaan SMA memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Fungsi :

- penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;

- pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah atas;
- penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah atas;
- penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas; dan
- pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas.

3. BIDANG PEMBINAAN SMK

Bidang Pembinaan SMK dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bidang Pembinaan SMK memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Fungsi :

- Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- penyusunan bahan fasilitasi kerja sama industri sekolah menengah kejuruan;
- Pengkajian pemberian izin penyelenggaraan SMK oleh masyarakat.
- Pengkajian kurikulum muatan lokal jenjang pendidikan SMK.
- Pembinaan penilaian hasil pembelajaran.
- Pelaksanaan Pembinaan Kesiswaan dan pembangunan karakter pada jenjang pendidikan SMK.
- Analisa kebutuhan Pemenuhan sarana dan prasana pendidikan pada satuan pendidikan jenjang SMK.
- Pembinaan pengelolaan kelembagaan satuan pendidikan jenjang SMK.

4. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan layanan pendidikan khusus di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Fungsi :

- penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;

- pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;
- penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus;
- penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan khusus;
- penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus; dan
- Pelaksanaan pelayanan deteksi dini dan terapi bagi penderita autisme.
- pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus.

5. BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rincian tugas dan fungsi Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dirinci sebagai berikut :

Tugas :

Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penataan dan pengelolaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Fungsi :

- Penyusunan bahan kebijakan terkait dengan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

- Penerapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan dan penataan guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- Pemberian perlindungan dan penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan Peningkatan Kompetensi guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan kajian dan analisa kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- Pemberian rekomendasi mutasi guru dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat rentang kendali yang sangat luas serta dengan mempertimbangkan letak geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi kepulauan, maka terdapat beberapa Cabang Dinas Pendidikan di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun cabang dinas tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Uraian tugas dan fungsi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka yaitu sebagai berikut :

Tugas :

Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan satuan pendidikan provinsi di wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.

Fungsi :

- Pembinaan dan pengawasan pelayanan pada Satuan Pendidikan Provinsi di lingkungan Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.
- Pelaksanaan administrasi umum di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka.
- Koordinasi penyusunan perencanaan pada tingkat satuan pendidikan provinsi di lingkungan Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.
- Penyelenggaraan pembinaan kegiatan kesiswaan pada satuan pendidikan provinsi di tingkat Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.
- Pembinaan dan pengawasan disiplin pegawai di lingkungan Satuan Pendidikan Provinsi dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka.
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum dan pelaksanaan penilaian di satuan pendidikan provinsi pada Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.

2. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Barat

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Barat dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Uraian tugas dan fungsi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Barat yaitu sebagai berikut :

Tugas :

Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Bangka Barat.

Fungsi :

- Pembinaan dan pengawasan pelayanan pada Satuan Pendidikan Provinsi di lingkungan Kabupaten Bangka Barat
- Pelaksanaan administrasi umum di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Barat.
- Koordinasi penyusunan perencanaan pada tingkat satuan pendidikan provinsi di lingkungan Kabupaten Bangka Barat.
- Penyelenggaraan pembinaan kegiatan kesiswaan pada satuan pendidikan provinsi di tingkat Kabupaten Bangka Barat.

- Pembinaan dan pengawasan disiplin pegawai di lingkungan Satuan Pendidikan Provinsi dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Barat.
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum dan pelaksanaan penilaian di satuan pendidikan provinsi pada Kabupaten Bangka Barat.

3. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan.

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Uraian tugas dan fungsi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan yaitu sebagai berikut :

Tugas :

Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan.

Fungsi :

- Pembinaan dan pengawasan pelayanan pada Satuan Pendidikan Provinsi di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan.
- Pelaksanaan administrasi umum di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan.
- Koordinasi penyusunan perencanaan pada tingkat satuan pendidikan provinsi di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan.
- Penyelenggaraan pembinaan kegiatan kesiswaan pada satuan pendidikan provinsi di tingkat Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan.
- Pembinaan dan pengawasan disiplin pegawai di lingkungan Satuan Pendidikan Provinsi dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan.
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum dan pelaksanaan penilaian di satuan pendidikan provinsi pada Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan.

4. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Uraian tugas dan fungsi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur yaitu sebagai berikut :

Tugas :

Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan satuan pendidikan provinsi di wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.

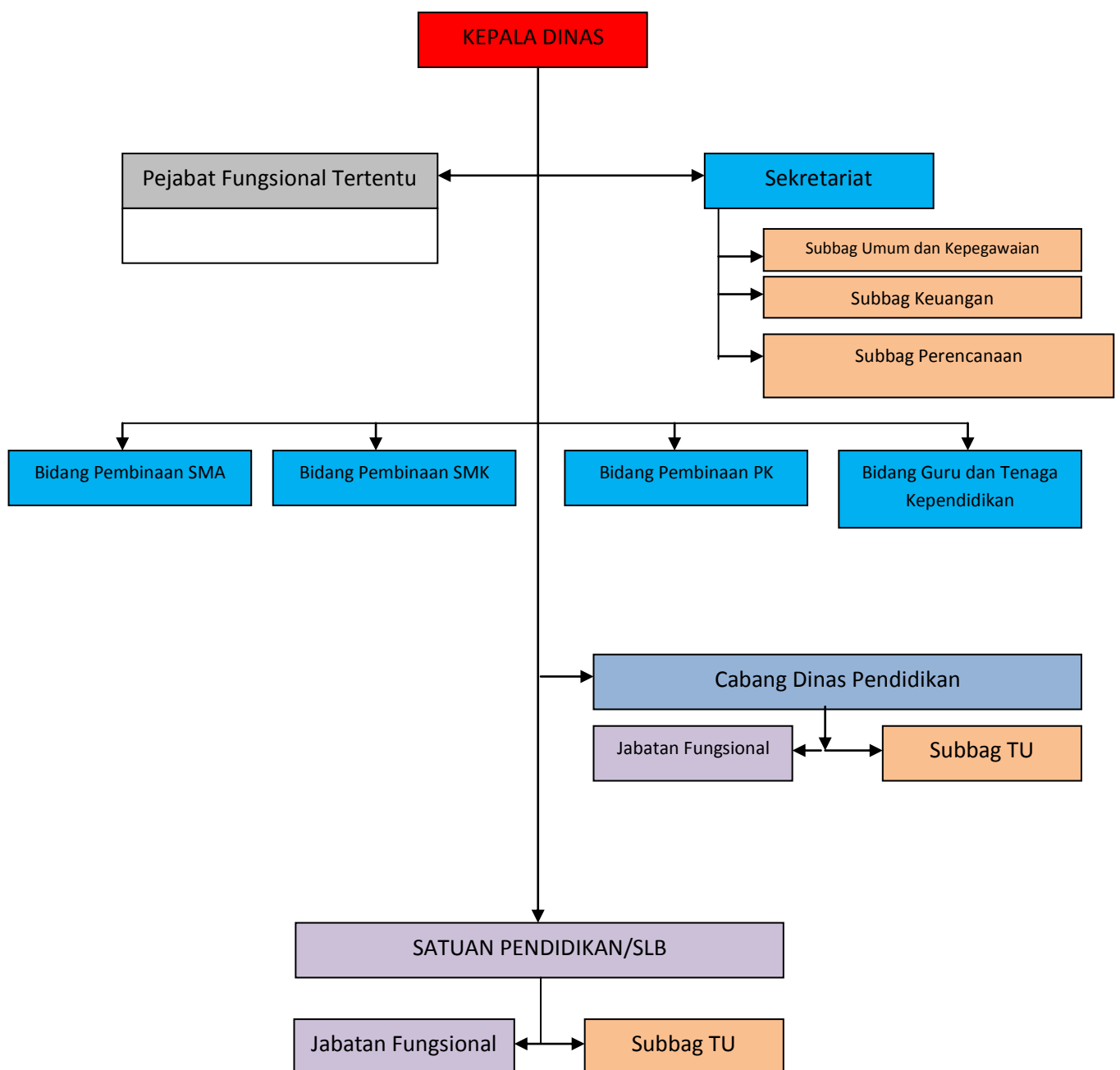
Fungsi :

- Pembinaan dan pengawasan pelayanan pada Satuan Pendidikan Provinsi di lingkungan Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.
- Pelaksanaan administrasi umum di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur.
- Koordinasi penyusunan perencanaan pada tingkat satuan pendidikan provinsi di lingkungan Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.
- Penyelenggaraan pembinaan kegiatan kesiswaan pada satuan pendidikan provinsi di tingkat Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.
- Pembinaan dan pengawasan disiplin pegawai di lingkungan Satuan Pendidikan Provinsi dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur.
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum dan pelaksanaan penilaian di satuan pendidikan provinsi pada Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.

Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berupa satuan pendidikan. Satuan Pendidikan tersebut berupa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selain itu juga terdapat UPTD yang mengelola Pendidikan Khusus terpadu yang selanjutnya disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Satuan pendidikan khusus yang dikelola oleh Sekolah Luar Biasa bentuk Taman kanak-kanan luar biasa (TKLB),

Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB).

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2 : Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.2. SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Hingga saat ini terdapat 4.033 orang pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik yang berstatus PNS maupun Non PNS. Untuk yang berstatus PNS seluruhnya berjumlah 2.192 orang dan yang non PNS seluruhnya berjumlah 1.841 orang yang tersebar pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus.

a. SDM PNS pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. SDM PNS pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan jenis kelamin

Tabel 2.1. Pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan jenis kelamin

DATA PNS	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN	
		L	P
DINAS PENDIDIKAN	81	44	37
SMAN/SMKN/SLBN	2,090	940	1,150
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (PANGKALPINANG DAN BANGKA)	10	9	1
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN)	5	5	-
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (BANGKA BARAT)	3	2	1
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR)	3	3	-
JUMLAH	2192	1003	1189

2. SDM PNS pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2. Pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Tingkat Pendidikan

DATA PNS	S-2	S-1	D-4	D-3	D-2	D-1	SLTA	SLTP	SD
DINAS PENDIDIKAN	12	50	-	13	1	-	5	-	-
SMAN/SMKN/SLBN	97	1,781	6	74	13	-	112	3	4
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (PANGKALPINANG DAN BANGKA)	3	5	-	1	-	-	1	-	-
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN)	-	3	-	1	-	-	1	-	-
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (BANGKA BARAT)	-	3	-	-	-	-	-	-	-
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR)	1	2	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	113	1,844	6	89	14	-	119	3	4

3. SDM PNS pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
berdasarkan Golongan

Tabel 2.3. Pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Golongan

DATA PNS	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c
DINAS PENDIDIKAN	1	-	5	5	19	20	9	10	8	2	1	1	-	-
SMAN/SMKN/SLBN	1	-	38	345	265	603	472	254	31	16	52	5	3	2
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (PANGKALPINANG DAN BANGKA)	-	-	-	-	2	2	4	2	-	-	-	-	-	-
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN)	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (BANGKA BARAT)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	2	-	43	352	289	629	485	266	41	18	53	6	3	2

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

a. Sumber daya Sarana dan Prasarana Dinas.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kantor yang beralamat di Jalan Pulau Bangka Kel. Air Itam – Pangkalpinang. Kantor berlantai 2. Pada kantor Dinas Pendidikan terdapat 1 (satu) ruang pertemuan kecil dan 1 (satu) ruang pertemuan besar. Seluruh ruangan di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilengkapi dengan Air Conditioner (AC) dan kamera pengaman (CCTV). Untuk mendukung kerja pegawai, di lingkungan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Belitung dilengkapi dengan jaringan internet beserta komputer dan printer, lemari arsip dan filling cabinet, meja dan kursi kerja, meubelair tamu serta meja dan kursi rapat.

b. Sumber daya sarana dan prasarana Satuan Pendidikan.

Hingga saat ini pada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan 43 (empat puluh tiga) SMA Negeri, 35 (tiga puluh lima) SMK dan 7 (tujuh) SLB. Selain itu, juga terdapat 28 (dua puluh delapan) SMA Swasta, 21 (dua puluh satu) SMK swasta dan 2 (dua) SLB swasta. Semua satuan pendidikan ini tersebar merata di 7 Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tabel berikut menunjukkan jumlah satuan pendidikan negeri dan swasta di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.4. Jumlah SMA, SMK dan SLB

No	Wilayah	SMA			SMK			SLB			TOTAL
		Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	
1	Kab. Bangka	17	10	7	11	5	6	2	1	1	30
2	Kab. Bangka Barat	10	6	4	9	5	4	1	1	0	19
3	Kab. Belitung	7	4	3	7	5	2	1	1	0	14
4	Kab. Belitung Timur	7	5	2	8	4	3	1	1	0	15
5	Kab. Bangka Selatan	12	8	4	7	6	1	1	1	0	18
6	Kab. Bangka Tengah	8	6	2	5	5	0	1	1	0	13
7	Kota Pangkalpinang	10	4	6	9	5	4	2	1	1	21
Total	Total	71	43	28	55	35	20	9	7	2	130

Untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat, sebagian telah dilengkapi dengan ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, perpustakaan, laboratorium dan ruang penunjang lainnya serta sarana olah raga. Tabel berikut menunjukkan fasilitas pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.5. Jumlah dan kondisi Ruang Kelas dan Ruang Penunjang lainnya SMA, SMK dan SLB

No	Jenis Ruang	SMA	SMK	SLB	TOTAL
1	Ruang kelas	857	822	x	1.842
	a. Baik	514	444	x	1.110
	b. Rusak ringan	311	344	x	666
	c. Rusak Sedang	11	11	x	22
	d. Rusak Berat	19	6	x	25
	e. Rusak Total	2	17	x	19
2	Perpustakaan	62	46	x	135
	a. Baik	62	45	x	129
	b. Rusak	0	1	x	6
3	Ruang UKS	35	24	x	59
	a. Baik	35	21	x	56
	b. Rusak	0	3	x	3
4	Tempat Olahraga (dalam/luar ruangan)	40	25	x	82
	a. Milik	40	25	x	82
	b. Bukan Milik	0	0	x	0
5	Laboratorium *)	161	89	x	266
	a. Baik	157	86	x	258
	b. Rusak	4	3	x	8
6	Ruang praktik gambar teknik SMK	x	0	x	0
	a. Baik	x	0	x	0
	b. Rusak	x	0	x	0

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dalam pengukuran kinerja dari sasaran strategis, maka Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan kategorisasi/predikat capaian kinerja sebagaimana dimuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.6

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Kinerja	
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	ST
2	$76 \leq 90$	Tinggi	T
3	$66 \leq 75$	Sedang	S
4	$51 \leq 65$	Rendah	R
5	≤ 50	Sangat Rendah	SR

Tabel 2.7

Capaian Kinerja Dinas Pendidikan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	PREDIKAT KINERJA
Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan	APK Pendidikan Menengah (%)	76,49	79,3	103,67	Sangat Tinggi

Pendidikan Khusus	APK Pendidikan Khusus (%)	61,24	52,68	86,02	Tinggi
Peningkatan Akses Pendidikan bagi masyarakat tidak mampu	% Masyarakat tidak mampu bersekolah di Pendidikan menengah	100	100	100	Sangat Tinggi
Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan SLB	% SMA, SMK dan SLB Terakreditasi A	40,15	40,15	100	Sangat Tinggi
Peningkatan Relevansi Pendidikan Vokasi	Jumlah Lulusan SMK yang disertifikasi oleh BNSP (orang)	100	100	100	Sangat Tinggi
Peningkatan layanan administrasi perkantoran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BB	BB	100	Sangat Tinggi

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 rata-rata Sangat Tinggi karena apa yang sudah menjadi target kinerja pelayanan dapat tercapai dengan sangat baik. Keberhasilan pelayanan ini tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain faktor kepemimpinan, kerja sama, koordinasi antar lintas sektor terutama dukungan anggaran untuk Bidang Pendidikan.

Secara lengkap target dan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel 2.7, sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel 2.8.

**Tabel 2.7 TARGET DAN PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	APK Pendidikan Menengah				76,49	85,77	89,67	96,10	100	79,3	-	-	-	-	103	-	-	-	-
	APK Pendidikan Khusus				61,24	68,43	75,62	82,81	90	52,68	-	-	-	-	86	-	-	-	-
2	% Masyarakat tidak mampu bersekolah di Pendidikan menengah				100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-
3	% SMA, SMK dan SLB Terakreditasi A				40,15	44,03	50,37	56,30	62,22	40,15	-	-	-	-	100	-	-	-	-
4	Jumlah Lulusan SMK yang disertifikasi oleh BNSP				100	200	300	400	500	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				BB	BB	A	A	A	BB	-	-	-	-	100	-	-	-	-

**Tabel 2.8. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018**

NO	URAIAN	Anggaran SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	4	-5	6	-7	-8	-9	-10	11	-12	-13	-14	-15	16	17	-18	-19
	BELANJA DAERAH	<u>480,405,681,506.00</u>					<u>444,268,322,265</u>	-	-	-	-	0,92	-	-	-	-	-	-
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	<u>235,860,540,205.00</u>					<u>234,623,199,635.00</u>	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-
2	BELANJA LANGSUNG	<u>244,545,141,301.00</u>					<u>209,645,122,630</u>	-	-	-	-	0,86	-	-	-	-	-	-

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Mengacu ketentuan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu untuk melaksanakan fungsi pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Selain itu Gubernur juga memiliki fungsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang pada pelaksanaannya yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dibidang pendidikan.

Berdasarkan hal ini, maka Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta melaksanakan fungsi Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, diketahui bahwa tantangan dan peluang pengembangan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 – 2022 yaitu sebagai berikut :

A. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Tantangan	<ol style="list-style-type: none">1. Hingga saat ini capaian keterlayanan akses pendidikan menengah yang diukur dengan capaian APK Pendidikan Menengah masih dibawah rata-rata nasional.2. Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Provinsi Kepulauan dengan sebaran penduduk yang tidak merata hingga ke pulau-pulau kecil dan memiliki beberapa wilayah yang belum tersentuh oleh transportasi umum.
-----------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar yang diukur dengan pencapaian APK SMP dibawah 95 %. 4. Rendahnya pemahaman masyarakat bagi siswa yang berkebutuhan khusus terutama untuk jenis kebutuhan khusus siswa dengan katagori slow learner (lambat belajar) serta penderita autis.
Peluang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menuntaskan wajib belajar hingga pendidikan menengah. 2. Beberapa Kabupaten/kota telah menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan rata-rata APK SMP sederajat telah mencapai diatas rata-rata nasional. 3. Telah tersedianya Satuan Pendidikan Menengah di seluruh kecamatan di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan

Tantangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata nilai Ujian Nasional Siswa SMA dan SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih dibawah rata-rata nasional. 2. Masih ada satuan pendidikan yang terakreditasi C dan belum terakreditasi. 3. Masih ada guru SMA, SMK dan SLB yang belum memenuhi kualifikasi minimal S1/D4. 4. Kompetensi guru yang belum memadai jika diukur dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG). 5. Keterbatasan Guru dan Tenaga Kependidikan yang berstatus PNS terutama untuk satuan pendidikan di daerah terpencil. 6. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di jenjang SMA, SMK dan SLB yang belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). 7. Keterbatasan lahan pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB terutama di daerah perkotaan sehingga sulit untuk mengembangkan satuan pendidikan tersebut . 8. Masih ada satuan pendidikan yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik dan jaringan internet terutama di daerah terpencil.
-----------	---

Peluang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. 2. Sebagian besar satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB telah terakreditasi minimal B. 3. Tingkat kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang cukup memadai.
---------	---

C. Relevansi Pendidikan Vokasi

Tantangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program keahlian SMK masih ada yang belum relevan dengan potensi daerah serta kebutuhan tenaga kerja. 2. Masih terbatasnya Unit/Bengkel Produksi pada pendidikan SMK. 3. Keterbatasan jumlah guru produktif SMK. 4. Keterbatasan satuan pendidikan SMK yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1
Peluang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi Daerah yang sangat beragam dan masih memungkinkan untuk dikembangkan seperti sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, kelautan dan kemaritiman. 2. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pemenuhan guru produktif SMK. 3. Adanya Dunia Usaha dan Dunia Industri yang memungkinkan untuk diajak kerjasama dalam pengembangan program keahlian SMK. 4. Koordinasi dengan instansi dan OPD teknis lainnya yang telah berjalan cukup baik.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI****3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG**

Mengacu ketentuan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Berdasarkan kewenangan ini dan mengacu kinerja tingkat layanan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diketahui bahwa ada beberapa capaian indikator target kinerja yang belum tercapai seperti tingkat akses layanan pendidikan menengah yang diukur dengan Angka Partisi Kasar (APK) Sekolah Menengah. Capaian APK Sekolah menengah hingga tahun 2018 baru mencapai 79,3 % dari target ketuntasan 95 %.

Dari aspek mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus, apabila ditinjau dari hasil akreditasi sekolah, baru 67,17 % SMA, SMK dan SLB yang terakreditasi minimal B. Selain itu rata-rata nilai ujian nasional siswa SMA dan SMK juga masih rendah. Faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan ini diantaranya pemenuhan 8 standar nasional pendidikan, kompetensi guru yang masih rendah, perlunya dukungan masyarakat dibidang pendidikan serta diperlukan adanya motivasi belajar bagi siswa agar mampu meraih prestasi.

Khusus untuk pendidikan vokasi (SMK) ternyata diketahui bahwa belum relevan antara program keahlian SMK dengan Potensi Daerah serta potensi kebutuhan

tenaga kerja di pasaran. Hal ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana praktik produktif di SMK, ketersediaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di SMK, keterbatasan guru produktif dan perlunya dukungan Dunia Usaha dan Dunia Industri serta instansi teknis pemerintah terkait lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi.

Secara detail, identifikasi permasalahan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
Layanan OPD	Tingkat keterlayanan pendidikan menengah dibawah 95 %	APK Dikmen	Ketersediaan daya tampung SMA	Sebaran penduduk yang tidak merata hingga ke pulau-pulau kecil	Tingkat akses pendidikan menengah dan pendidikan khusus masih rendah
			Ketersediaan layanan pendidikan khusus yang terbatas	Rendahnya pemahaman masyarakat bagi siswa yang berkebutuhan khusus	
			Angka melanjutkan ke Dikmen masih rendah	Masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar	
Layanan OPD	% sekolah yang terakreditasi min B baru mencapai 67,17 %	Akreditasi Sekolah	Pemenuhan 8 standar nasional pendidikan	Partisipasi masyarakat dibidang pendidikan	Mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang masih rendah
	Hasil ujian nasional siswa SMA/SMK di peringkat dibawah 25 nasional	Rata-rata nilai UN Nasional	Kompetensi guru yang rendah	Motivasi belajar siswa	
Kajian terhadap renstra K/L	Relevansi antara program keahlian SMK dengan potensi daerah dan kebutuhan tenaga kerja yang belum sesuai	% Lulusan SMK yang bekerja	Keterbatasan Unit Produktif SMK	Dukungan Dunia usaha dan Dunia Industri.	Belum relevannya program keahlian SMK dengan potensi daerah dan kebutuhan tenaga kerja
			Ketersediaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1) di sekolah	Koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah Terkait	
			Keterbatasan Guru Produktif SMK	Tidak adanya PT Kependidikan untuk guru produktif SMK	

Dari identifikasi permasalahan sebagaimana ditampilkan pada tabel diatas, dapat disusun pemetaan permasalahan pelayanan perangkat daerah pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Akses Pendidikan menengah dan pendidikan khusus masih rendah	Angka Melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah masih rendah	Jumlah RKB terbatas
			Masih ada pemukiman pendidikan yang jaraknya cukup jauh dari satuan pendidikan menengah terdekat
			Kemampuan ekonomi sebagian masyarakat terbatas.
		Masih ada anak berkebutuhan khusus tidak sekolah	Terbatasnya jumlah Satuan pendidikan khusus Masih ada anak berkebutuhan khusus yang belum teridentifikasi
2	Mutu Pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang masih rendah	Belum terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan	Belum terpenuhinya standar sarana dan parasana
			Belum terpenuhinya standar pengelolaan dan pembiayaan
			Belum terpenuhinya standar Guru dan Tenaga Kependidikan mulai dari kompetensi, kualifikasi, sertifikasi serta sebaran dan jumlah guru dan tenaga kependidikan
3	Belum relevannya program keahlian SMK dengan untuk peningkatan sektor unggulan daerah dibidang kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian dan perkebunan dan kebutuhan tenaga kerja bidang lainnya	Kompetensi lulusan masih rendah	Kurangnya sarana pembelajaran produktif
			Belum terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi di SMK
			Keterbatasan guru Produktif
		Masih banyak lulusan SMK yang tidak bekerja atau melanjutkan	Program keahlian tidak sinkron dengan kebutuhan tenaga kerja dan potensi lokal Kurangnya kerjasama dengan DUDI dan instansi Pemerintah Terkait

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dirumuskan oleh pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 yaitu sebagai berikut :

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”

Untuk mencapai visi ini ada 4 (Empat) misi yang terkait dengan pembangunan bidang pendidikan, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Peningkatan sumberdaya manusia unggul dan handal;
3. Meningkatkan kesehatan masyarakat; dan
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi.

Tabel berikut merupakan faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 2025				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah			
	Sasaran : Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan	Belum relevannya program keahlian SMK dengan potensi daerah bidang Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan.	1. Keterbatasan guru produktif SMK untuk sektor Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan. 2. Ketersediaan Sarana Praktik Produktif SMK Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan yang terbatas. 3. Belum tersertifikasi dan terstandarisasinya lulusan SMK bidang Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan	1. Ketersediaan SMK bidang Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan. 2. Kerjasama kemitraan antara DUDI dan instansi pemerintah lainnya.
	Sasaran : Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	Belum relevannya program keahlian SMK dengan potensi daerah bidang Perikanan dan Kemaritiman.	1. Keterbatasan guru produktif SMK untuk sektor Perikanan dan Kemaritiman. 2. Ketersediaan Sarana Praktik Produktif SMK Perikanan dan	1. Ketersediaan SMK bidang Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan. 2. Kerjasama kemitraan antara DUDI dan instansi

			Kemaritiman yang terbatas. 3. Belum tersertifikasi dan terstandarisasinya lulusan SMK bidang Perikanan dan Kemaritiman	pemerintah lainnya.
	Sasaran : Meningkatkan pengembangan Pembangunan pariwisata	Belum relevannya program keahlian SMK dengan potensi daerah bidang Pariwisata.	1. Keterbatasan guru produktif SMK untuk sektor Perikanan dan Kemaritiman. 2. Ketersediaan Sarana Praktik Produktif SMK Perikanan dan Kemaritiman yang terbatas. 3. Belum tersertifikasi dan terstandarisasinya lulusan SMK bidang Perikanan dan Kemaritiman	1. Ketersediaan SMK bidang Pariwisata. 2. Kerjasama kemitraan antara DUDI dan instansi pemerintah lainnya.
	Sasaran : Menurunnya angka kemiskinan	Masih ada masyarakat yang tidak mampu yang harus mendapat layanan pendidikan	Masih ada biaya personil pendidikan yang harus di bebaskan kepada masyarakat	Ketersediaan anggaran min 20 % dari APBD untuk sektor pendidikan
2	Misi 3. Peningkatan sumber daya manusia unggul dan handal	1. Tingkat akses pendidikan menengah dan pendidikan khusus masih rendah 2. Mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang masih rendah	1. Daya tampung pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terbatas. 2. Belum terpenuhinya 8 standar nasional pendidikan.	1. Ketersediaan anggaran min 20 % dari APBD. 2. Telah tersedianya SMA dan SMK di setiap kecamatan.
	Sasaran : Meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat			
3	Misi 3 : Meningkatkan kesehatan masyarakat	Terbatasnya SDM di bidang Kesehatan	1. Terbatasnya guru di SMK Bidang Kesehatan. 2. Terbatasnya sarpras di SMK Bidang Kesehatan	1. Ketersediaan anggaran min 20 % dari APBD untuk sektor pendidikan. 2. Ketersediaan SMK Bidang Kesehatan
4	Misi 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi	Belum terukurnya tingkat kepuasan publik terhadap layanan pendidikan.	1. Belum Optimalnya pengelolaan layanan pendidikan di satuan pendidikan. 2. Sinkronisasi dan koordinasi yang belum optimal untuk penyusunan dokumen perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja	Adanya komitmen dari pemerintah provinsi untuk membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel
	Sasaran : Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas			

3.3. TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA KABUPATEN/KOTA

Pada rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – 2019 telah ditetapkan visi Kemendikbud di tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

Visi Kemendikbud 2019:

“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mencapai visi ini telah dilaksanakan 5 (lima) misi yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu.
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

Ada 16 sasaran strategis dalam upaya pelaksanaan 5 misi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tabel berikut menunjukkan permasalahan pelayanan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan pencapaian sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 - 2019 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya perilaku positif siswa	- Peningkatan perilaku positif siswa masih lambat	- Kurangnya guru BP di sekolah. - Kurangnya partisipasi masyarakat	Pendidikan keluarga sudah dimas
2	Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan	Kurangnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pendidikan.		Adanya perda tentang pendidikan
3	Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual, dan sosial	Sebagian besar guru memiliki nilai UKG dibawah 50 % Tidak pernah dilakukan penilaian kualitas tenaga kependidikan	Penilaian Kompetensi hanya terbatas pada Kompetensi Pedagogi dan Profesi. Belum ada penilaian kompetensi untuk tenaga kependidikan	Tersedianya sarana untuk pelatihan kepribadian dan sosial GTK
4	Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan	Merupakan kewenangan Disbudpar		
5	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota		-	-
6	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah	APK Pendidikan menengah masih dibawah rata-rata nasional	Angka melanjutkan SMP yang rendah. Angka DO masih cukup tinggi	Adanya koordinasi dengan Disdik Kab/Kota. Telah disediakan beasiswa miskin
7	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	-	-	-
8	Meningkatnya mutu layanan dan	Mutu layanan pendidikan	Belum terpenuhinya 8	Dukungan anggaran

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	lulusan pendidikan dasar dan menengah	menengah masih rendah	SNP	pendidikan
9	Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	Nilai rata-rata UKG Guru dibawah 60. Sebagian besar tenaga kependidikan berstatus tenaga tidak tetap. Kekurangan guru Produktif SMK	UKG hanya dilakukan 1 kali setahun. Tidak tersedianya PT Kependidikan di Babel	
10	Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Belum semua satuan pendidikan memprogramkan kegiatan pendidikan keluarga	Terbatasnya pemahaman pemangku kepentingan tentang pendidikan keluarga	Dapat dilakukan pada
11	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk pendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	-	-	-
12	Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela ipteks dan penguat daya saing Indonesia	-	-	-
13	Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN	-	-	-
14	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud	Penilaian LAKIP Disdik Prov baru mencapai 66,15 (B)	Dokumen Perencanaan yang tidak sinkron	Adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait
15	Dipertahankannya opini laporan keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	-	-	-
16	Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan	-	-	-

3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Seperti diketahui bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari 2 (dua) pulau besar serta ratusan pulau kecil yang berpenghuni dan tidak berpenghuni. Sebagian besar wilayah provinsi ini merupakan wilayah pertambangan serta ada beberapa wilayah yang merupakan daerah rawan bencana terutama rawan banjir.

Tabel berikut menunjukkan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis yang terkait dengan permasalahan layanan bidang pendidikan :

Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lokasi pemukiman terletak di daerah kepulauan yang tidak bisa dijangkau oleh transportasi umum	Masyarakat kesulitan untuk mengakses layanan pendidikan yang letaknya jauh dari pemukiman	Lokasi pemukiman masyarakat tidak bisa diakses oleh transportasi umum	Sebagian masyarakat memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan
2	Pengembangan kawasan ekonomi khusus dibidang kepariwisataan	Belum memadainya Sarpras SMK kepariwisataan	- Keterbatasan lahan pengembangan satuan pendidikan - Keterbatasan Guru Produktif	Kerjasama dengan DUDI ke pariwisata
3	Daerah rawan bencana	Beberapa satuan pendidikan terletak di daerah rawan banjir	Sulit untuk mengalokasikan rehabilitasi sekolah yang terkena bencana	Telah dilakukan mitigasi bencana di daerah rawan bencana

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Pengidentifikasi isu strategis merupakan jantung dari proses perencanaan strategis. Misi organisasi sering secara eksplisit maupun implisit dimaknai sebagai suatu isu. Isu strategis sangat penting, karena mereka berperan sentral dalam pengambilan keputusan politis. Pengambilan keputusan politis selalu beranjak dari isu-isu. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dengan cara membingkai isu-isu yang penting dan mengirim isu-isu itu ke pengambil keputusan kunci. Ketika isu strategis berhasil diidentifikasi, maka selanjutnya disusun kerangka rincinya dalam beberapa subsekuensi, beberapa keputusan, dan kerangka aksi. Apabila isu strategis berhasil dirinci seperti itu, maka secara politis akan mudah diterima dan lebih lanjut secara teknis dan administratif dapat lebih mudah dikerjakan. Bahkan, secara filosofis dapat dikaitkan dengan nilai dan dasar organisasi baik ditinjau secara moral etis maupun legal. Identifikasi isu strategis secara tipikal harus melalui serangkaian proses berjenjang yang harus dilakukan pelaku perencanaan strategis.

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan pelayanan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta berdasarkan hasil telaah terhadap Visi dan Misi Gubernur, telaah terhadap renstra Kemendikbud dan telaah terhadap RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat ditentukan isu-isu strategis di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebagai berikut :

- 1. Belum optimalnya akses layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.**
- 2. Rendahnya mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus.**
- 3. Belum relevannya program keahlian pada pendidikan vokasi dengan Potensi Daerah dan kebutuhan tenaga kerja.**
- 4. Belum Optimalnya dukungan manajemen layanan pendidikan.**

BAB IV

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Untuk pelaksanaan misi diatas tentu saja diperlukan adanya penetapan tujuan dan sasaran strategis. Tujuan yang ditetapkan tersebut merupakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi Adapun tujuan dari rencana pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2017 – 2022 yaitu dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 4.1. Rumusan Tujuan

Isu Strategis	Rumusan Tujuan
Belum optimalnya akses layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus	Meningkatnya kesempatan Pendidikan bagi masyarakat
Rendahnya mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus	
Belum relevannya program keahlian pada pendidikan vokasi dengan Potensi Daerah dan kebutuhan tenaga kerja	
Belum Optimalnya dukungan manajemen layanan pendidikan	

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
Difokuskan pada sasaran :
 - a. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah.
 - b. Peningkatan Akses Pendidikan Khusus
2. Tersedianya layanan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu di fokuskan pada sasaran Peningkatan Akses Pendidikan bagi masyarakat tidak mampu

3. Meningkatnya Mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
Difokuskan pada sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan Sekolah Luar Biasa.
4. Meningkatnya Relevansi Pendidikan Vokasi difokuskan pada sasaran Peningkatan Relevansi Pendidikan vokasi bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan; bidang Perikanan dan Kemaritiman; bidang Pariwisata; bidang Kesehatan dan bidang unggulan lainnya
5. Tersedianya Dukungan Layanan Manajemen Pendidikan
Difokuskan pada sasaran pemberian dukungan manajemen pendidikan untuk pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan Peningkatan Kepuasan masyarakat atas layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus

Keselarsan tujuan dan sasaran diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2. Keselarasan Tujuan dan Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Bidang Pendidikan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya kesempatan Pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah	Peningkatan APK Pendidikan Menengah	APK Pendidikan Menengah
		Peningkatan APK Pendidikan Khusus	APK Pendidikan Khusus
		Peningkatan Akses Pendidikan bagi masyarakat tidak mampu	% Masyarakat tidak mampu bersekolah di Pendidikan menengah
		Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan SLB	% SMA, SMK dan SLB Terakreditasi A
		Peningkatan Relevansi Pendidikan vokasi	Jumlah Lulusan SMK yang disertifikasi oleh BNSP
		Peningkatan layanan Administrasi Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Secara lengkap sasaran serta target kinerja sasaran pada rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3. Sasaran dan target indikator sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2017	Target Kinerja Sasaran				
					2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kesempatan Pendidikan bagi masyarakat	Peningkatan Akses Pendidikan Menengah	APK Pendidikan Menengah	%	72,58%	76,49%	85,77%	89,67%	96,10%	100%
	Peningkatan Akses Pendidikan Khusus	APK Pendidikan Khusus	%	54,06%	61,24%	68,43%	75,62%	82,81%	90%
	Peningkatan Akses Pendidikan bagi masyarakat tidak mampu	% Masyarakat tidak mampu bersekolah di Pendidikan menengah	%	0	100	100	100	100	100
	Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan SLB	Persentase SMA, SMK dan SLB Terakreditasi A	%	35,66%	40,15%	44,03%	50,37%	56,30%	62,22 %
	Peningkatan Relevansi Pendidikan vokasi	Jumlah Lulusan SMK yang disertifikasi oleh BNSP	orang	0	100	200	300	400	500
	Peningkatan layanan Administrasi Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nilai	B	BB	BB	A	A	A

4.2. HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022. Tabel berikut menjelaskan keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pada Rencana Strategis ini dengan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022.

Tabel 4.4. Hubungan Tujuan dan Sasaran Renstra dengan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD

RPJMD				Renstra		
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan		Peningkatan Relevansi Pendidikan Vokasi	Jumlah Lulusan SMK yang disertifikasi oleh BNSP

RPJMD				Renstra		
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran	Indikator
		Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	Meningkatnya kesempatan Pendidikan bagi masyarakat	Peningkatan Relevansi Pendidikan Vokasi	Jumlah Lulusan SMK yang disertifikasi oleh BNSP
		Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata	jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara)		Peningkatan Relevansi Pendidikan Vokasi	Jumlah Lulusan SMK yang disertifikasi oleh BNSP
Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat	Pendapatan perkapita Masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan		Peningkatan Akses Pendidikan bagi masyarakat tidak mampu	% Masyarakat tidak mampu bersekolah di Pendidikan menengah
Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan)	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah (Tahun)		Peningkatan Akses Pendidikan Menengah	APK Dikmen
					Peningkatan Akses Pendidikan Khusus	APK Pendidikan Khusus
					Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan SLB	Persentase SMA, SMK dan SLB Terakreditasi A
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat		Peningkatan Relevansi Pendidikan Vokasi	Jumlah Lulusan SMK yang disertifikasi oleh BNSP
Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat			
				Peningkatan layanan Administrasi Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	

BAB V**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Agar tercapainya tujuan serta sasaran pembangunan bidang pendidikan, perlu ditetapkan strategi dan kebijakan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan untuk menjamin tercapainya target sasaran yang telah ditetapkan diatas. Penetapan strategi dan kebijakan ini tentunya telah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 - 2022.

Strategi dan arah kebijakan sendiri merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berikut adalah perumusan strategi dan kebijakan umum untuk setiap upaya pencapaian target sasaran pembangunan bidang pendidikan :

1. Strategi Pencapaian Indikator Peningkatan Akses Pendidikan SMA dan SMK.

<div> <div>Faktor Eksternal</div> <div>Faktor Internal</div> </div>	Peluang : 1. Dukungan pembiayaan dari APBD dan APBN melalui DAK cukup Tinggi	Tantangan: 1. Motivasi orang tua rendah. 2. Jauhnya jarak sekolah ke pemukiman
Kekuatan : 1. Sistem manajemen berbasis sekolah dan masyarakat.	Alternatif Strategi : 1. Memperbaiki Sistem Penerimaan Siswa baru	Alternatif Strategi : 1. Revitalisasi Guru BK 2. Menerapkan Pendidikan Keluarga pada jenjang SMA/SMK
Kelemahan: 1. Keterbatasan daya tampung sekolah. 2. Terbatasnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.	Alternatif Strategi : 1. Penambahan daya tampung (RKB dan USB) 2. Pemerataan guru dan tenaga kependidikan	Alternatif Strategi : 1. Penyediaan Asrama Siswa.

2. Strategi Pencapaian Indikator Peningkatan Akses Pendidikan Khusus.

<div> <div>Faktor Eksternal</div> <div>Faktor Internal</div> </div>	Peluang : 1. Dukungan pembiayaan dari APBD dan APBN melalui DAK cukup Tinggi	Tantangan: 1. Kurangnya pemahaman masyarakat untuk anak berkebutuhan khusus. 2. Jauhnya jarak sekolah ke pemukiman
Kekuatan : 1. Tersedianya Pusat Layanan Autis. 2. Sistem manajemen berbasis sekolah dan masyarakat.	Alternatif Strategi : 1. Memperbaiki Sistem Penerimaan Siswa baru. 2. Optimalisasi fungsi PLA	Alternatif Strategi : 1. Mendeteksi dini anak berkebutuhan khusus. 2. Menerapkan Pendidikan Keluarga pada jenjang Pendidikan khusus.
Kelemahan: 1. Keterbatasan daya tampung sekolah. 2. Terbatasnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.	Alternatif Strategi : 1. Menambah daya tampung (RKB). 2. Pemerataan guru dan tenaga kependidikan.	Alternatif Strategi : 1. Membangun Asrama siswa 2. Menerapkan Pendidikan Inklusi

3. Strategi Pencapaian Indikator Peningkatan Akses Pendidikan bagi masyarakat tidak mampu :

<div> <div>Faktor Eksternal</div> <div>Faktor Internal</div> </div>	Peluang : Dukungan pembiayaan dari APBD dan APBN melalui DAK cukup Tinggi.	Tantangan: Keterbatasan Kemampuan Orang tua/wali siswa
Kekuatan : Sistem manajemen berbasis sekolah dan masyarakat.	Alternatif Strategi : Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Tidak Mampu	Alternatif Strategi :
Kelemahan: Biaya Pribadi yang harus ditanggung siswa cukup tinggi	Alternatif Strategi : Penyediaan biaya pribadi bagi siswa tidak mampu	Alternatif Strategi : Penyediaan biaya pribadi bagi siswa tidak mampu

4. Strategi Pencapaian Indikator Peningkatan Relevansi Pendidikan Vokasi :

<div> <div>Faktor Eksternal</div> <div>Faktor Internal</div> </div>	Peluang : 1. Dukungan pembiayaan dari APBD dan APBN melalui DAK cukup Tinggi. 2. Terdapat DUDI	Tantangan: 1. Daya Saing Lulusan masih rendah.
Kekuatan : 1. Sistem manajemen berbasis sekolah dan masyarakat.	Alternatif Strategi : - Meningkatkan relevansi pendidikan SMK - Kerjasama dengan DUDI serta Instansi Pemerintah Lainnya	Alternatif Strategi : - Pengembangan LSP SMK
Kelemahan: 3. Kurangnya sarana produktif SMK. 4. Terbatasnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.	Alternatif Strategi : - Pemenuhan Sarana Produktif SMK - Pemenuhan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan	Alternatif Strategi : - Penyesuaian Program Keahlian SMK dengan sektor unggulan daerah dan kondisi wilayah.

5. Strategi Pencapaian Indikator Peningkatan Mutu Pendidikan SMA dan SMK

<div> <div>Faktor Eksternal</div> <div>Faktor Internal</div> </div>	Peluang : 1. Dukungan pembiayaan dari APBD dan APBN melalui DAK cukup Tinggi	Tantangan: 1. Daya saing siswa dan lulusan rendah. 2. Nilai UN rendah
Kekuatan : 1. Tersedianya guru dan tenaga kependidikan disekolah. 2. Tersedianya siswa di sekolah	Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. 2. Memberi penghargaan dan perlindungan bagi guru.	Alternatif Strategi : 1. Melaksanakan lomba-lomba siswa dan GTK. 2. Menyediakan beasiswa prestasi. 3. Melaksanakan pelatihan kurikulum bagi guru. 4. Try out UN
Kelemahan: 1. Sarpras belum memadai. 2. Kompetensi guru rendah. 3. Kualifikasi guru rendah. 4. Pengelolaan sekolah belum memadai. 5. Pembiayaan operasional sekolah belum memadai. 6. Pengawasan pelaksanaan KBM belum optimal.	Alternatif Strategi : 1. Memenuhi Sarpras. 2. Rehabilitasi Sarpras 3. Meningkatkan kompetensi guru. 4. Menyediakan beasiswa kualifikasi GTK. 5. Melaksanakan Sertifikasi Kepsek dan Calon Kepsek. 6. Menyediakan Biaya Operasional Sekolah. 7. merevitalisasi peran Pengawas Sekolah	Alternatif Strategi :

6.Strategi Pencapaian Indikator Peningkatan layanan Administrasi Pemerintahan

<div> <div>Faktor Eksternal</div> <div>Faktor Internal</div> </div>	Peluang : 1. Dukungan pembiayaan dari APBD dan APBN melalui DAK cukup Tinggi 2. Adanya mitra kerja dan stake holder pendidikan. 3. Tersedianya PT yang	Tantangan: 1. Banyaknya masyarakat, mitra kerja dan stake holder yang membutuhkan layanan. 2. Terbatasnya anggaran pendidikan pada APBD
---	---	---

Faktor Internal	bermutu	Kab/Kota. 3. Jumlah keluarga yang tidak mampu cukup tinggi
Kekuatan : 1. Tersedianya Kantor Dinas Pendidikan Prov. Kep. Babel. 2. Tersedianya Pegawai 3. Banyak mahasiswa dan calon mahasiswa yang berprestasi	Alternatif Strategi : 1. Menyediakan biaya administrasi perkantoran. 2. Menyediakan beasiswa bagi lulusan pendidikan menengah yang berprestasi.	Alternatif Strategi : 1. Menerapkan disiplin pegawai. 2. Penyediaan penyaluran BOS. 3. Menyediakan beasiswa bagi lulusan pendidikan menengah yang tidak mampu
Kelemahan: 1. Sarpras belum memadai. 2. Belum terkoordinasinya dan tersinkronisasinya dokumen perencanaan 3. Rentang Kendali yang jauh 4. Kurang optimalnya penyusunan pelaporan dan monev.	Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan Sarpras pegawai. 2. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan. 3. Mengoptimalkan penyusunan laporan dan pelaksanaan Monev	Alternatif Strategi : 1. Menambah Sarpras. 2. Meningkatkan Kompetensi Pegawai. 3. Mengoptimalkan peran Cabdin Kab/Kota. 4. Menyediakan bantuan keuangan kepada Kab/Kota

Berdasarkan analisis penentuan alternatif strategi dan arah kebijakan diatas, dapat dirumuskan strategi dan kebijakan umum untuk setiap sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Umum

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kesempatan Pendidikan bagi masyarakat	Peningkatan Akses Pendidikan SMA dan SMK	Meningkatkan Akses Pendidikan SMA dan SMK	1. Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) 2. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di daerah yang lulusan SMP tidak tertampung. 3. Penambahan Jumlah GTK sesuai dengan analisis kebutuhan GTK. 4. Perbaikan Sistem Penerimaan Siswa Baru 5. Pembangunan Asrama Siswa. 6. Penerapan Pendidikan keluarga di satuan pendidikan. 7. Revitalisasi Guru BK
	Peningkatan Akses Pendidikan Khusus	Meningkatkan Akses Pendidikan Khusus	1. Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) 2. Penambahan Jumlah GTK sesuai dengan analisis kebutuhan GTK. 3. Pembangunan Asrama Siswa. 4. Penerapan Pendidikan keluarga di satuan pendidikan. 5. Revitalisasi Guru BK 6. Penerapan Pendidikan Inklusi 7. Optimalisasi Fungsi PLA 8. Mendeteksi dini siswa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			berkebutuhan khusus
	Peningkatan Akses Pendidikan masyarakat mampu	Penyediaan biaya pribadi bagi siswa tidak mampu	Pemberian Beasiswa bagi siswa tidak mampu
	Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	Meningkatkan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan SLB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kesejahteraan guru. 2. Pemberian penghargaan dan perlindungan bagi guru 3. Pemenuhan kebutuhan Sarpras sesuai SNP 4. Rehabilitasi sarpras yang rusak. 5. Peningkatan Kompetensi Guru. 6. Pemberian Beasiswa kualifikasi bagi GTK 7. Pelaksanaan sertifikasi Kepsek dan Calon Kepsek. 8. Revitalisasi peran pengawas sekolah. 9. Pelaksanaan lomba-lomba siswa dan GTK. 10. Penyediaan beasiswa prestasi bagi siswa berprestasi 11. Pelatihan kurikulum bagi guru 12. Revitalisasi PLA
	Peningkatan relevansi pendidikan SMK	Meningkatkan Relevansi Pendidikan Vokasi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan LSP SMK ✓ Pemenuhan Sarana Produktif SMK ✓ Pemenuhan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan ✓ Penyesuaian Program Keahlian SMK dengan sektor unggulan daerah dan kondisi wilayah ✓ Kerjasama dengan DUDI serta Instansi Pemerintah Lainnya
	Peningkatan layanan Administrasi Pemerintahan	Meningkatkan layanan administrasi pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyediaan biaya administrasi perkantoran. ✓ Peningkatan sarpras aparatur ✓ Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan. ✓ Pelaksanaan penyusunan laporan dan Monev. ✓ Peningkatan disiplin pegawai. ✓ Peningkatan Kompetensi Pegawai ✓ Optimalisasi peran Cabang Dinas Pendidikan ✓ Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dengan kab/kota dan kementerian teknis terkait. ✓ Penyediaan beasiswa bagi lulusan pendidikan menengah dan mahasiswa berprestasi dan/atau tidak mampu. ✓ Penyediaan bantuan keuangan kepada kab/kota sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF****6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan program prioritas yang tercantum dalam RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang tercantum pada bab sebelumnya.

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta dengan mempedomani RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 – 2022 ada 10 Program dan 212 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dalam bentuk Belanja Langsung Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun Program yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.1. Program dan Jumlah Kegiatan

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	14 Kegiatan
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	5 Kegiatan
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Kejuruan	5 Kegiatan
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	5 Kegiatan
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	3 Kegiatan
6	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	27 Kegiatan
7	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	13 Kegiatan
8	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	29 Kegiatan
9	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur	22 Kegiatan
10	Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	89 Kegiatan
Total Kegiatan		212 Kegiatan

6.2. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF

Untuk menguji tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tentu saja diperlukan adanya indikator kinerja untuk setiap program dan kegiatan beserta kelompok sasaran serta pagu indikatif untuk setiap kegiatan. Keselarasan antara sasaran, program dan kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatif untuk masing-masing pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.2. Sasaran, Program/Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target dan Pagu Indikatif 2017 – 2022

NO	Program/kegiatan	Indikator Kinerja (outcome/output)	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	4	4	19,577,236,000	4	22,951,669,825	5	43,615,598,300	5	34,760,000,000	5	37,500,000,000	5	158,404,504,125
		Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	persen	100	100		100		100		100		100		100	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	persen	100	100	1,805,185,000	100	2,987,519,825	100	2,586,050,000	100	2,200,000,000	100	2,500,000,000	100	12,078,754,825
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	persen	100	100	379,876,000	100	2,735,000,000	100	9,877,260,000	100	1,200,000,000	100	1,200,000,000	100	15,392,136,000
		DED Taman Edukasi Tata Surya	dokumen						1							
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	persen	100	100	198,800,000	100	0	100	350,000,000	100	230,000,000	100	250,000,000	100	1,028,800,000
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	persen	100	100	177,555,000	100	300,000,000	100	499,960,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	1,977,515,000

5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	dokumen	2	2	302,189,000	2	200,000,000	2	2,200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	3,102,189,000
6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah kabupaten/kota pelaksanaan SPM	kab/kota	7	7	80,843,000	7	125,000,000	7	500,000,000	7	500,000,000	7	500,000,000	7	1,705,843,000
		Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	laporan	5	5		5		6		7		7		7	
7	Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)	Terlaksananya Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional	jenjang	3	3	0	3	0	3	0	3	1,150,000,000	3	1,200,000,000	3	2,350,000,000
8	Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa dan PTK Tingkat Provinsi	Terseleksinya anggota tim Lomba Siswa dan PTK Tk. Provinsi	Tim	10	10	5,969,422,000	10	6,000,000,000	21	8,169,878,300	21	8,500,000,000	21	8,750,000,000	21	37,389,300,300
9	Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau berprestasi	Jumlah masyarakat berprestasi menerima beasiswa ke luar negeri	orang	0	0	7,915,417,000	0	8,000,000,000	0	16,000,000,000	20	16,000,000,000	25	17,000,000,000	45	64,915,417,000
		Jumlah lulusan sekolah menengah yang tidak mampu dan/atau berprestasi menerima beasiswa	orang	934	934		1050		1100		1125		1150		5359	

10	Pelaksanaan Kegiatan Siswa dan PTK Tingkat Nasional	Jenis kegiatan siswa dan PTK Tk. Nasional dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	jenis	1	1	1,791,215,000	1	1,500,000,000	2	2,200,000,000	1	3,000,000,000	1	4,000,000,000	7	12,491,215,000
11	Peningkatan pelaksanaan pendidikan paud oleh kab/kota	Terbinanya Pendidikan PAUD	kab/kota	7	7	956,734,000	7	859,550,000		0		0		0	7	1,816,284,000
		Tersedianya Majalah Pendidikan PAUD Tk. Provinsi	eksemplar	120	120											
12	Pencetakan Majalah Pendidikan	Jumlah Paket Majalah Pendidikan		0	0	0	0	0	1	859,550,000	1	900,000,000	1	1,000,000,000	3	2,759,550,000
13	Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi	Tersedianya Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi	dokumen	1	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
14	Rekonsiliasi Keuangan BOS APBD, APBN, IPP dan Bantuan Pemerintah	Jumlah triwulan pelaksanaan rekonsiliasi	Triwulan	0	0	0	4	244,600,000	4	372,900,000	4	380,000,000	4	400,000,000	4	1,397,500,000
		Jumlah peserta Bimtek Keuangan	orang	0	0		180		180		200		200		760	
B	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas-															138,529,710,500
		Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	Persen	100	100	12,449,061,000	100	29221004500	100	37,859,645,000	100	31,300,000,000	100	27,700,000,000	100	
		Rata-rata nilai UN SMA	point	6.3	6.3		6.5		6.8		7		7.3		7.3	
		APK SMA Perempuan	Persen	39.25	39.25		42.44		43.52		46.07		46.16		46.16	
		APK SMA,	Persen	35.29	35.29		38.88		40.63		43.43		43.94		43.94	
		APK SMA Laki-Laki	%	31.55	31.55		35.52		37.91		40.94		41.85		41.85	

		Persentase SMA terakreditasi minimal A	Person	37.88	37.88		42.42		50		56.06		60.61		60.61	
1	Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMA					3,378,456,000		7574500000		11,000,000,000		12,000,000,000		13,000,000,000		46,952,956,000
	Jumlah meubelair yang diadakan	set	16	16			150		350		450		100		1066	
	Jumlah RKB dibangun	Ruang	2	2			2		10		15		20		49	
	Jumlah Lab dibangun	ruang	1	1			2		5		10		10		28	
	Jumlah Pagar sekolah dibangun	sekolah	2	2			4		3		4		5		18	
	Jumlah WC siswa/guru dibangun	unit	5	5			0		5		5		5		20	
	Jumlah ruang guru yang dibangun	ruang	2	2			0		2		2		2		8	
	Jumlah rumah dinas guru yang dibangun	unit	1	1			0		1		1		1		4	
	Jumlah galeri kesenian yang dibangun	unit	1	1			0		1		1		1		4	
	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan/rehab SMA	dokumen	0	0			0		5		10		10		25	
	Jumlah Ruang Belajar yang direhab	ruang	3	3			5		5		5		5		23	
	Jumlah Laboratorium yang direhab	ruang	0	0			0		1		3		3		7	
	Jumlah Ruang Guru yang direhab	ruang	0	0			0		3		3		3		9	
	Jumlah WC/Jamban Siswa/Guru yang direhab	unit	0	0			0		3		3		3		9	

		Jumlah Ruang Penunjang lainnya yang direhab	Ruang	0	0		0		3		3		3		9	
		Jumlah aula yang dibangun	ruang	0	0		0		1		1		1		3	
		Jumlah peralatan CBT SMA	paket	0	0		1		1		1		1		4	
		Jumlah peralatan komputer UNBK														
			paket	0	0		2		1		1		1		5	
		Jumlah pengadaan buku														
			paket	0	0		1		1		1		1		4	
2	Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA	Jumlah Peserta Sosialisasi Parenting	orang	0	0	3,378,456,000	0	4,062,802,500	0	8,147,885,000	100	8,000,000,000	120	8,200,000,000	220	31,789,143,500
		Terlaksananya Kegiatan Kesiswaan di SMA	sekolah	70	70		70		70		70		70		70	
		Terlaksananya Pendidikan Karakter Siswa SMA	orang	500	500		500		2,192		2000		2000		7,192	
		Terlaksananya Lomba-lomba siswa SMA	jenis	12	12		12		12		12		12		12	
		Terselenggaranya raker dan pelatihan kesiswaan SMA	kali	1	1		1		1		1		1		5	
3	Pengembangan Kurikulum SMA					1,634,719,000		769,025,000		1,200,000,000		1,300,000,000		1,500,000,000		6,403,744,000
		SMA melaksanakan UNBK	sekolah	68	68		68		68		68		68		68	
		Guru SMA mengikuti pelatihan Kurikulum	sekolah	68	68		68		68		68		68		68	
4	Pemberian Beasiswa Siswa SMA	Jumlah siswa SMA tidak mampu mendapat beasiswa	siswa	1437	1437	1,738,430,000	2500	2,511,760,000	2500	2,511,760,000	2500	0	0	0	6437	6,761,950,000
5	Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler)					2,319,000,000		14,302,917,000		15,000,000,000		10,000,000,000		5,000,000,000		46,621,917,000

		Jumlah Ruang Sekolah yang direhab	Ruang	0	0		28		25		28		25		106	
		Jumlah RKB yang dibangun	ruang	0	0		8		10		10		10		38	
		Jumlah Toilet /Jamban siswa/guru yang dibangun	unit	0	0		8		10		10		10		38	
		Jumlah Rumah Dinas Guru yang dibangun	unit	0	0		6		2		2		2		12	
		Jumlah Peralatan Pendidikan, Sarana PJO, Sarana Seni Budaya dan Media Pendidikan	paket	19	19		48		40		40		40		187	
		Jumlah Lab. IPA yang dibangun	Ruang	0	0		2		2		2		6		12	
C	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan-	Persentase SMK Pertanian dan Peternakan memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	Persen	0	0	23,612,491,000	50	44,836,815,424	50	33,821,936,500	100	34,400,000,000	100	35,700,000,000	100	172,371,242,924
		Persentase SMK dengan program keahlian Pertanian, Perkebunan dan Peternakan yang memiliki Akreditasi A	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase SMK pariwisata Terakreditasi minimal A	Persen													
		APK SMK	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
				34.98	34.98		38.38		40.63		44.32		48.62		48.62	

APK SMK Perempuan	Persen	33.72	33.72		37.44		40.09		44.23		49.07		49.07	
APK SMK Laki-laki	Persen	36.17	36.17		39.27		41.15		44.4		48.19		48.19	
Persentase SMK Program Keahlian Kesehatan Terakreditasi A	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
Persentase SMK Kelautan dan perikanan Terakreditasi A	Persen	50	50		100		100		100		100		100	
Persentase SMK Program Keahlian Pariwisata memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	Persen	33.33	33.33		33.33		66.66		66.66		100		100	
Rata-rata nilai UN SMA	Poin	6.4	6.4		6.5		6.7		6.8		7		7	
Persentase SMK Program Keahlian Kesehatan memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	Persen	0	0		0		100		100		100		100	
Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
Persentase SMK Program Keahlian Kelautan dan Perikanan memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	Persen	50	50		100		100		100		100		100	

		Persentase siswa SMK mieldn yang mendapatkan beasiswa mieldn	Persen													
				100	100	4,004,843,000	100	5,755,040,000	100	22,717,500,000	100	21,000,000,000	100	22,000,000,000	100	75,477,383,000
1	Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kleembagaan SMK					4,004,843,000		5,755,040,000		22,717,500,000		21,000,000,000		22,000,000,000		75,477,383,000
		Terlaksananya Gebyar SMK	kali	1	1		1		0		1		1		4	
		Jumlah Peralatan Praktik Siswa	paket	10	10		20		20		20		20		90	
		Jumlah Meubelair SMK	set	6	6		200		540		20		20		786	
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/rehab SMK	dokumen	0	0		7		7		7		7		28	
		Rakor Sapras	kali	1	1		1		1		1		1		5	
		Jumlah SMK yang direhab	ruang	10	10		23		26		10		5		74	
		Jumlah RPS/Bengkel Produktif SMK yang dibangun	sekolah	1	1		9		1		1		1		13	
		Bimtek Sekolah yang siap diakreditasi	kali	0	0		0		1		1		1		3	
		Jumlah Pagar Sekolah yang dibangun	unit	2	2		3		3		3		3		14	
		Jumlah Pagar Sekolah yang direhab	unit	0	0		1		1		1		1		4	
		Jumlah RKB SMK yang dibangun	ruang	2	2		10		5		20		20		57	
		Tersedianya talud penahan tanah	sekolah	0	0		1		1		1		1		4	

		Jumlah komputer dan jaringan komputer yang diadakan	set	0	0		160		20		50		50		300	
		Jumlah mushola yang dibangun	ruang	0	0		1		0		1		1		3	
		Jumlah wc yang dibangun	unit	0	0		1		1		1		1		4	
		Jumlah USB SMK yang dibangun	unit	0	0		0		1		1		0		2	
		jumlah pengadaan buku	paket						1		1		1		3	
		Jumlah Homestay yang dibangun							1		1		0		2	
		Terlaksananya revitalisasi prodi SMK	sekolah						57		58		58		58	
		Jumlah RPS yang direhab	paket						1		1		1		3	
2	Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK	Jumlah siswa mengikuti pembinaan karakter	siswa	0	0	1,173,895,000	0	3,321,946,500	747	6,373,376,500	750	6,300,000,000	750	6,500,000,000	2247	23,669,218,000
		Jumlah Peserta Sosialisasi Parenting	orang	0	0		0				100		120		220	
															0	
		Pelaksanaan Lomba-lomba Siswa SMK	jenis	3	3		3		3		4		5		5	
		Sekolah melaksanakan pendidikan karakter	sekolah	58	58		58		58		58		58		58	
		Terlaksananya pembinaan kesiswaan SMK	sekolah	58	58		58		58		58		58		58	
3	Pengembangan Kurikulum SMK	Tersedianya analisis instrumen kurikulum SMK	dokumen	1	1	2,148,263,000	1	1,135,999,000	1	2,000,000,000	1	2,100,000,000	1	2,200,000,000	5	9,584,262,000
		Tersedianya Bank Soal Penilaian SMK	dokumen	1	1		1		1		1		1		5	

		Tersedianya Asesor	orang	50	50		50		50		60		60		270	
		SMK memiliki TUK	sekolah	9	9		12		15		18		21		21	
		SMK melaksanakan UNBK	sekolah	58	58		58		58		58		58		290	
		Jumlah guru yang mengikuti diklat pengembangan kurikulum	orang	120	120		120		120		120		120		600	
		Jumlah guru yang mengikuti pendidikan penyusunan dokumen mutu Pembentukan LSP P1 SMK	orang	0	0		0		40		40		40		120	
4	Pemberian Beasiswa Siswa SMK	Jumlah Siswa Tidak Mampu terbiyai	siswa	1180	1180	1,379,490,000	1200	1,231,060,000	1100	1,231,060,000	0	0	0	0	3480	3,841,610,000
5	Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK Penugasan)			1	1	14,906,000,000	0	33,392,769,924	2	1,500,000,000	2	5,000,000,000	2	5,000,000,000	7	59,798,769,924
		Jumlah rumah dinas /asrama (Unit)	Unit	1	1		0		30		25		25		81	
		Jumlah RKB SMK (Ruang)	Ruang	7	7		16		4		4		4		35	
		Jumlah peralatan Praktik Siswa (Paket)	Paket	4	4		7		20		25		25		81	
		Jumlah RPS (Unit)	Unit	0	0		54		30		30		30		144	
		Jumlah WC/KM Siswa (Unit)	Unit													
D	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus-	APK SLB	Persen	26.21	26.21	9,359,178,000	29.47	5,902,154,500	29.47	12,853,388,010	32.74	14,200,000,000	36	17,500,000,000	36	59,814,720,510
		Persentase SLB terakreditasi A	Persen	30	30		50		80		90		100		100	

1	Peningkatan sarana/prasarana dan pengembangan kelembagaan pendidikan khusus	Jumlah Microbus Operasional SLB	unit	2	2	1,122,880,000	2	1,204,200,000	3	5,750,000,000	0	6,000,000,000	0	7,000,000,000	7	21,077,080,000
		Jumlah RKB yang dibangun	ruang	0	0		4		0		4		4		12	
		Jumlah SLB yang direhab	sekolah	4	4		0		0		0		0		4	
		jumlah ruang penunjang yang dibangun	ruang	1	1		0		0		2		2		5	
		Jumlah meubelair SLB	set	9	9		0		0						9	
		Jumlah RPS SLB	ruang	0	0		2		0		2		2		6	
		Jumlah Pagar Sekolah	unit	0	0		0		2		2		2		6	
		Jumlah Mushola SLBN	unit	0	0		0		3		3		3		9	
		Jumlah Ruang UKS SLBN	unit	0	0		0		2		2		2		6	
		Jumlah Gallery SLBN	unit	0	0		0		1		1		1		3	
		Jumlah Ruang Keterampilan SLBN	ruang	0	0		0		1		1		1		3	
		Jumlah Talud SLBN	paket	0	0		0		2		2		2		6	
2	Peningkatan kualitas kesiswaan Pendidikan Khusus	Terbinanya kegiatan kesiswaan di SLB	sekolah	9	9	1,173,895,000	9	1,081,291,500	9	1,678,877,500	9	1,700,000,000	9	1,800,000,000	9	
		Terlaksananya lomba-lomba siswa SLB	jenis	3	3		3		3		3		3		3	
3	Pengembangan kurikulum pendidikan khusus	Jumlah SLB yang menerapkan Kurikulum 2016 dan Kurikulum 2006	sekolah	9	9	723,455,000	9	918,565,000	9	1,382,150,000	9	1,400,000,000	9	1,500,000,000	9	5,924,170,000
		Jumlah SLB melaksanakan pendidikan keluarga	sekolah	9	9		9		9		9		9		9	
4	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis	Terlaksananya pelayanan Pusat layanan Autis	bulan	12	12	1,279,948,000	12	1,477,771,000	12	3,042,360,510	12	3,100,000,000	12	3,200,000,000	12	12,100,079,510

5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus (DAK Fisik)					5,059,000,000		1,220,327,000		1,000,000,000		2,000,000,000		4,000,000,000		13,279,327,000
		Jumlah SLB yang direhab	sekolah	5	5		0		4		5		5		19	
		Jumlah RKB SLB dibangun	ruang	39	39		0		3		3		3		48	
		Tersedianya peralatan Praktik Siswa	paket	9	9		24		15		20		20		88	
E	Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan-	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4,	Persen	95	95	3,587,971,904	97	2,615,988,343	100	16,601,873,000	100	16,750,000,000	100	18,500,000,000	100	58,055,833,247
		Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	Persen	36	36		40		45		50		60		60	
		Persentase guru dengan Nilai Rata-rata Kompetensi Guru minimal 50	Persen	85	85		90		95		100		100		100	
1	Peningkatan Mutu PTK SMA	Terseleksinya Kontingen guru berprestasi ke tingkat Nasional (Orang)	orang	0	0	1,325,065,000	150	967,219,643	150	9,579,605,000	150	9,600,000,000	150	10,000,000,000	600	31,471,889,643
		Jumlah guru dan tenaga kependidikan SMA terlatih	orang	358	358		75		100		125		150		808	
		Jumlah guru SMA menerima beasiswa S2	orang	0	0		15		25		40		40		120	
		Jumlah guru SMA mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan	orang	0	0		15		17		20		25		77	

		Jumlah dokumen analisa kebutuhan guru SMA	dokumen	1	1		1		1		1		1		5	
2	Peningkatan Mutu PTK SMK	Jumlah guru SMK menerima beasiswa S2	orang	0	0	1,421,874,904	8	1,150,823,700	40	5,815,995,000	40	5,900,000,000	40	7,000,000,000	128	21,288,693,604
		Jumlah guru dan tenaga kependidikan SMK terlatih	orang	344	344		200		200		200		200		1144	
		Jumlah guru SMK mengikuti PPG	orang	0	0		15		30		30		30		105	
		Jumlah guru SMK/SMA/SLB mengikuti lomba guru berprestasi	orang	0	0		125		125		125		125		500	
		Jumlah kepala sekolah mengikuti pelatihan sertifikasi kepeksek	orang	0	0		0		30		30		30		90	
		Jumlah dokumen analisa kebutuhan guru SMK	dokumen	1	1		1		1		1		1		5	
3	Peningkatan Mutu PTK SLB	Jumlah guru SLB terlatih	orang	157	157	841,032,000	200	497,945,000	200	1,206,273,000	200	1,250,000,000	200	1,500,000,000	957	5,295,250,000
		Jumlah guru mengikuti pendidikan PPG	orang	0	0		3		10		10		10		33	
		Jumlah guru PLB menerima beasiswa S2	orang	0	0		0		2		2		2		6	
		Jumlah dokumen analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan SLB	dokmen	1	1		1		1		1		1		5	

F	Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS	%	100	100	65,476,087,397	100	94,786,811,800	100	66,448,122,000	100	75,885,381,427	100	94,786,811,800	100	397,383,214,424
1	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Teritip (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	-	-	-	100	97,600,000	100	92,800,000	100	300,000,000	100	97,600,000	100	
2	Pengelolaan Dana BOS Afirmas	Sekolah penerima bantuan BOS	sekolah	-	-	-	20	15,125,000,000	20	1,627,922,000	20	15,125,000,000	20	15,125,000,000	20	
3	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	-	-	-	100	84,000,000	100	33,600,000	100	300,000,000	100	84,000,000	100	
4	Pengelolaan Dana BOS Kinerja	Sekolah penerima BOS Kinerja	sekolah	-	-	-	13	8,731,810,000	13	1,000,000,000	15	8,731,810,000	20	8,731,810,000	20	
5	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	483,135,439	100	474,385,167	100	474,000,000	100	181,353,533	100	474,385,167	100	2,087,259,306
6	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Sungailiat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	199,694,000	100	234,129,327	100	244,000,000	100	102,102,525	100	234,129,327	100	1,014,055,179
7	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Mentok (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	150,085,000	100	150,102,437	100	148,000,000	100	102,102,525	100	150,102,437	100	700,392,399
8	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Toboali (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	144,132,132	100	178,659,537	100	166,000,000	100	102,102,525	100	178,659,537	100	769,553,731
9	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Koba (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	157,567,627	100	160,491,505	100	160,000,000	100	102,102,525	100	160,491,505	100	740,653,162
10	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	226,735,781	100	272,008,998	100	272,000,000	100	130,059,169	100	272,008,998	100	1,172,812,946
11	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Manggar (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	182,098,499	100	200,129,896	100	204,000,000	100	102,102,525	100	200,129,896	100	888,460,816

12	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	1,376,027,586	100	1,479,439,948	100	1,324,400,000	100	812,736,099	100	1,479,439,948	100	6,472,043,581
13	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	1,090,800,466	100	1,176,144,865	100	1,191,400,000	100	731,054,079	100	1,176,144,865	100	5,365,544,275
14	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	1,461,202,832	100	1,460,440,850	100	1,260,000,000	100	788,231,498	100	1,460,440,850	100	6,430,316,030
15	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	884,831,521	100	957,484,578	100	960,400,000	100	602,404,898	100	957,484,578	100	4,362,605,575
16	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	1,618,307,149	100	2,072,204,346	100	1,382,400,000	100	1,397,102,884	100	2,072,204,346	100	8,542,218,725
17	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	2,705,336,861	100	3,086,842,101	100	2,497,600,000	100	2,622,333,184	100	3,086,842,101	100	13,998,954,247
18	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	1,198,263,464	100	1,365,984,121	100	1,214,400,000	100	1,090,795,309	100	1,365,984,121	100	6,235,427,015
19	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	847,986,614	100	1,075,548,343	100	985,600,000	100	801,504,821	100	1,075,548,343	100	4,786,188,121
20	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 5 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	567,218,962	100	541,634,113	100	526,400,000	100	592,194,645	100	541,634,113	100	2,769,081,833
21	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Bakam (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	367,433,900	100	376,727,982	100	366,800,000	100	223,604,530	100	376,727,982	100	1,711,294,394
22	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	729,492,105	100	753,327,223	100	742,000,000	100	497,239,297	100	753,327,223	100	3,475,385,848

23	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Belinyu (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	849,291,152	100	806,870,348	100	722,400,000	100	496,218,272	100	806,870,348	100	3,681,650,120
24	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	344,315,119	100	349,409,200	100	345,800,000	100	180,721,469	100	349,409,200	100	1,569,654,988
25	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Merawang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	705,333,991	100	764,729,465	100	621,600,000	100	415,557,277	100	764,729,465	100	3,271,950,198
26	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pemali (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	1,342,207,637	100	1,362,903,093	100	1,174,600,000	100	771,895,089	100	1,362,903,093	100	6,014,508,912
27	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Puding Besar (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	762,658,035	100	733,871,995	100	628,600,000	100	502,344,423	100	733,871,995	100	3,361,346,448
28	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Puding Besar (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	147,684,959	100	185,142,777	100	180,600,000	100	60,240,490	100	185,142,777	100	758,811,003
29	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Riau Silip (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	522,522,905	100	555,907,783	100	554,400,000	100	258,319,388	100	555,907,783	100	2,447,057,859
30	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	1,296,610,966	100	1,313,493,851	100	1,269,800,000	100	880,123,766	100	1,313,493,851	100	6,073,522,434
31	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Bakam (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	504,124,576	100	605,701,836	100	579,200,000	100	498,600,664	100	605,701,836	100	2,793,328,912
32	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Belinyu (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	703,614,043	100	774,852,676	100	649,600,000	100	515,617,751	100	774,852,676	100	3,418,537,146
33	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	359,967,424	100	482,052,676	100	433,600,000	100	437,339,149	100	482,052,676	100	2,195,011,925

34	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	1,721,090,511	100	1,679,665,822	100	1,675,200,000	100	1,807,214,693	100	1,679,665,822	100	8,562,836,848
35	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Sungailiat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	1,050,798,019	100	1,083,066,685	100	1,049,600,000	100	1,133,338,028	100	1,083,066,685	100	5,399,869,417
36	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Jebus (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	874,085,298	100	911,034,830	100	903,000,000	100	608,531,049	100	911,034,830	100	4,207,686,007
37	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kelapa (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	881,636,770	100	866,690,168	100	862,400,000	100	616,699,251	100	866,690,168	100	4,094,116,357
38	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Muntok (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	1,220,286,033	100	1,447,351,711	100	966,000,000	100	596,278,746	100	1,447,351,711	100	5,677,268,201
39	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Parit Tiga (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	700,764,621	100	865,199,900	100	658,000,000	100	327,749,105	100	865,199,900	100	3,416,913,526
40	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Teritip (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	1,019,551,647	100	900,037,023	100	865,200,000	100	510,512,625	100	900,037,023	100	4,195,338,318
41	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Tempilang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	556,476,915	100	605,981,110	100	537,600,000	100	355,316,787	100	605,981,110	100	2,661,355,922
42	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Kelapa (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	803,007,434	100	937,618,645	100	902,400,000	100	888,291,968	100	937,618,645	100	4,468,936,692
43	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Muntok (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	1,240,261,192	100	1,262,813,613	100	1,179,200,000	100	1,131,636,319	100	1,262,813,613	100	6,076,724,737
44	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Parit Tiga (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	1,114,505,677	100	1,167,028,594	100	1,142,400,000	100	1,038,042,338	100	1,167,028,594	100	5,629,005,203

45	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tempilang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	375,557,138	100	461,256,244	100	448,000,000	100	469,671,615	100	461,256,244	100	2,215,741,241
46	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Koba (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	1,031,243,721	100	1,076,516,919	100	935,200,000	100	614,657,201	100	1,076,516,919	100	4,734,134,760
47	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Lubuk Besar (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	728,405,048	100	907,046,633	100	666,400,000	100	375,737,292	100	907,046,633	100	3,584,635,606
48	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Namang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	667,455,641	100	619,916,043	100	589,400,000	100	417,599,327	100	619,916,043	100	2,914,287,054
49	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pangkalan Baru (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	678,641,363	100	750,333,888	100	728,000,000	100	404,325,999	100	750,333,888	100	3,311,635,138
50	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sungai Selan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	419,543,298	100	422,279,291	100	345,800,000	100	236,877,858	100	422,279,291	100	1,846,779,738
51	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Sungai Selan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	768,691,366	100	955,960,393	100	848,400,000	100	535,017,231	100	955,960,393	100	4,064,029,383
52	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Koba (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	764,252,050	100	770,059,009	100	760,000,000	100	670,473,248	100	770,059,009	100	3,734,843,316
53	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Koba (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	1,486,386,446	100	1,873,371,625	100	1,257,600,000	100	1,335,841,369	100	1,873,371,625	100	7,826,571,065
54	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pangkalan Baru (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	1,543,001,420	100	1,568,848,870	100	1,350,400,000	100	1,487,293,448	100	1,568,848,870	100	7,518,392,608
55	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Katis (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	1,215,447,433	100	1,289,400,000	100	1,220,800,000	100	1,215,020,048	100	1,289,400,000	100	6,230,067,481

56	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Sungai Selan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	351,676,040	100	470,830,405	100	387,200,000	100	338,640,041	100	470,830,405	100	2,019,176,891
57	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Air Gegas (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	904,005,610	100	918,028,454	100	879,200,000	100	470,692,640	100	918,028,454	100	4,089,955,158
58	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kep. Pongok (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	286,260,000	100	277,279,406	100	271,600,000	100	177,658,394	100	277,279,406	100	1,290,077,206
59	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Lepar Pongok (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	333,471,368	100	346,535,387	100	343,000,000	100	221,562,479	100	346,535,387	100	1,591,104,621
60	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Payung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	871,906,374	100	890,833,378	100	854,000,000	100	570,753,115	100	890,833,378	100	4,078,326,245
61	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	203,293,727	100	216,059,958	100	215,600,000	100	92,913,298	100	216,059,958	100	943,926,941
62	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	554,843,718	100	585,971,499	100	579,600,000	100	372,674,216	100	585,971,499	100	2,679,060,932
63	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Toboali (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	1,236,206,241	100	1,247,151,048	100	1,232,000,000	100	840,303,781	100	1,247,151,048	100	5,802,812,118
64	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Toboali (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	768,314,988	100	686,469,596	100	662,200,000	100	465,587,514	100	686,469,596	100	3,269,041,694
65	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Air Gegas (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	455,078,017	100	540,061,489	100	515,200,000	100	627,930,529	100	540,061,489	100	2,678,331,524
66	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Payung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	491,256,763	100	579,569,403	100	574,400,000	100	563,265,596	100	579,569,403	100	2,788,061,165

67	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	155,945,500	100	160,112,135	100	163,200,000	100	175,276,001	100	160,112,135	100	814,645,771
68	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	214,200,000	100	251,200,000	100	235,200,000	100	98,699,108	100	251,200,000	100	1,050,499,108
69	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Toboali (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	1,007,038,396	100	1,170,549,335	100	1,166,400,000	100	1,180,985,873	100	1,170,549,335	100	5,695,522,939
70	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tukak Sadai (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	461,778,061	100	561,690,911	100	518,400,000	100	447,549,401	100	561,690,911	100	2,551,109,284
71	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Membalong (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	647,883,045	100	697,555,310	100	690,200,000	100	453,335,211	100	697,555,310	100	3,186,528,876
72	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sijuk (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	677,382,793	100	792,966,200	100	676,200,000	100	464,566,489	100	792,966,200	100	3,404,081,682
73	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	1,047,268,259	100	1,017,079,869	100	1,010,800,000	100	674,086,918	100	1,017,079,869	100	4,766,314,915
74	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	1,074,441,690	100	1,044,688,935	100	1,038,800,000	100	715,738,700	100	1,044,688,935	100	4,918,358,260
75	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Badau (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	693,327,638	100	771,096,179	100	764,800,000	100	779,382,608	100	771,096,179	100	3,779,702,604
76	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Selat Nasik (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	255,828,323	100	286,262,794	100	243,200,000	100	224,625,555	100	286,262,794	100	1,296,179,466
77	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	1,489,048,606	100	1,506,925,581	100	1,499,200,000	100	1,827,635,198	100	1,506,925,581	100	7,829,734,966

78	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	1,180,074,695	100	1,307,982,126	100	1,276,800,000	100	1,334,139,660	100	1,307,982,126	100	6,406,978,607
79	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 3 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	852,965,160	100	837,331,941	100	806,400,000	100	850,854,375	100	837,331,941	100	4,184,883,417
80	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Damar (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	481,622,917	100	459,205,058	100	450,800,000	100	327,749,105	100	459,205,058	100	2,178,582,138
81	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Gantung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	880,304,148	100	929,176,178	100	907,200,000	100	578,921,317	100	929,176,178	100	4,224,777,821
82	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	651,004,712	100	748,898,248	100	637,000,000	100	399,220,873	100	748,898,248	100	3,185,022,081
83	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Manggar (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	929,801,958	100	964,811,501	100	926,800,000	100	617,720,276	100	964,811,501	100	4,403,945,236
84	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Pesak (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	762,801,393	100	713,093,650	100	642,600,000	100	398,199,848	100	713,093,650	100	3,229,788,541
85	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Dendang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	316,381,053	100	401,330,197	100	201,600,000	100	311,412,701	100	401,330,197	100	1,632,054,148
86	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	1,319,666,507	100	1,631,037,987	100	795,200,000	100	777,680,899	100	1,631,037,987	100	6,154,623,380
87	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Manggar (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	863,692,423	100	1,101,950,149	100	1,096,000,000	100	1,024,428,668	100	1,101,950,149	100	5,188,021,389
88	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Renggang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%	100	100	267,547,488	100	262,569,440	100	262,400,000	100	250,151,186	100	262,569,440	100	1,305,237,554

89	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Sijuk (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan	%						100	387,200,000	100	384,000,000	100	384,000,000	100	1,155,200,000
G	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Pangkalpinang dan Bangka	Persen	76.61	76.61	34,452,540,000	79.29	36,315,130,000	81.97	41,916,781,840	84.64	49,368,600,000	90	49,368,600,000	90	211,421,651,840
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	Jumlah sekolah terlayani	sekolah	26	26	10,374,390,000	26	13,519,833,000	27	16,848,981,840	27	16,000,000,000	27	16,000,000,000	27	72,743,204,840
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 1 Pangkalpinang terlayani	siswa	797	797	1,374,200,000	797	1,328,450,000	864	1,403,600,000	797	1,800,000,000	797	1,800,000,000	4052	7,706,250,000
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang	Jumlah Siswa SMK N 2 Pangkalpinang terlayani	siswa	1573	1573	2,618,800,000	1500	2,424,200,000	1,549	2,542,000,000	1,500	3,500,000,000	1,500	3,500,000,000	7622	14,585,000,000
4	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang	Jumlah Siswa SMK N 3 Pangkalpinang terlayani	siswa	705	705	1,172,000,000	593	1,644,985,000	759	1,251,500,000	657	1,314,000,000	689	1,314,000,000	3403	6,696,485,000
5	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 4 Pangkalpinang terlayani	siswa	550	550	914,000,000	518	886,700,000	616	1,028,000,000	582	1,164,000,000	614	1,164,000,000	2880	5,156,700,000
6	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 5 Pangkalpinang terlayani	siswa	337	337	550,200,000	372	494,015,000	329	526,400,000	436	872,000,000	468	872,000,000	1942	3,314,615,000
7	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang	Jumlah siswa SMA N 1 Pangkalpinang terlayani	siswa	868	868	1,255,200,000	797	943,640,000	946	1,377,400,000	800	1,500,000,000	800	1,500,000,000	4211	6,576,240,000

8	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang	Jumlah Siswa SMA N 2 Pangkalpinang terlayani	siswa	768	768	1,112,200,000	743	1,054,540,000	851	1,207,300,000	807	1,452,600,000	839	1,452,600,000	4008	6,279,240,000
9	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang	Jumlah Siswa SMA N 3 Pangkalpinang terlayani	siswa	884	884	1,277,600,000	827	1,212,340,000	899	1,306,300,000	891	1,603,800,000	923	1,603,800,000	4424	7,003,840,000
10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang	Jumlah Siswa SMA N 4 Pangkalpinang terlayani	siswa	631	631	924,400,000	631	878,100,000	684	984,100,000	695	1,251,000,000	727	1,251,000,000	3368	5,288,600,000
11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang	Jumlah siswa SLB N Pangkalpinang terlayani	siswa	223	223	1,367,000,000	260	1,084,350,000	237	1,216,800,000	280	2,009,000,000	290	2,009,000,000	1290	7,686,150,000
12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka	Jumlah siswa SMKN 1 Sungailiat terlayani	siswa	1036	1036	1,704,600,000	1082	1,525,683,000	1,044	1,734,000,000	1,156	2,312,000,000	1,188	2,312,000,000	5506	9,588,283,000
13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka	Jumlah siswa SMK N 2 Sungailiat terlayani	siswa	627	627	1,023,200,000	691	956,350,000	655	1,063,900,000	755	1,510,000,000	787	1,510,000,000	3515	6,063,450,000
14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangk	Jumlah siswa SMKN 1 Mendobarat terlayani	siswa	258	258	435,800,000	321	422,800,000	270	447,900,000	449	898,000,000	513	898,000,000	1811	3,102,500,000
15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka	Jumlah siswa SMKN 1 Belinyu terlayani	siswa	380	380	612,000,000	364	605,620,000	406	692,000,000	492	984,000,000	556	984,000,000	2198	3,877,620,000
16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka	Jumlah siswa SMK N 1 Bakam terlayani	siswa	361	361	583,600,000	281	565,420,000	356	612,000,000	409	818,000,000	473	818,000,000	1880	3,397,020,000
17	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMAN 1 Bakam terlayani	siswa	228	228	322,200,000	281	333,800,000	262	382,700,000	409	700,200,000	473	700,200,000	1653	2,439,100,000
18	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMAN 1 Belinyu Terlayani	siswa	504	504	724,600,000	514	735,330,000	515	795,200,000	514	950,000,000	514	950,000,000	2561	4,155,130,000

19	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMA N 1 Mendobarat terlayani	siswa	521	521	748,400,000	520	706,100,000	528	776,300,000	552	993,600,000	552	993,600,000	2673	4,218,000,000
20	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka	Jumlah Siswa SMAN 2 Mendobarat terlayani	siswa	212	212	300,800,000	207	319,880,000	247	377,600,000	271	487,800,000	303	487,800,000	1240	1,973,880,000
21	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMA N 1 Merawang terlayani	siswa	415	415	598,950,000	448	555,974,000	443	662,600,000	512	921,600,000	512	921,600,000	2330	3,660,724,000
22	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMA N 1 Pemali terlayani	siswa	801	801	1,153,400,000	800	1,026,615,000	838	1,226,200,000	800	1,500,000,000	800	1,500,000,000	4039	6,406,215,000
23	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMA N 1 Puding Besar terlayani	siswa	485	485	699,000,000	521	626,340,000	449	660,400,000	585	1,053,000,000	617	1,053,000,000	2657	4,091,740,000
24	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMA N 1 Riau Silip terlayani	siswa	322	322	455,800,000	338	471,720,000	395	595,400,000	402	723,600,000	434	723,600,000	1891	2,970,120,000
25	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMA N 1 Sungailiat terlayani	siswa	898	898	1,290,200,000	889	1,162,929,000	907	1,359,900,000	890	1,650,000,000	890	1,650,000,000	4474	7,113,029,000
26	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMA N 2 Puding Besar terlayani	siswa	97	97	252,000,000	160	305,516,000	129	201,800,000	288	518,400,000	352	518,400,000	1026	1,796,116,000
27	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat	Jumlah Siswa SLB N Sungailiat terlayani	siswa	99	99	608,000,000	106	523,900,000	122	636,500,000	126	882,000,000	136	882,000,000	589	3,532,400,000

H	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Barat	persen	76.61	76.61	13,735,620,000	79.29	14,278,363,000	81.97	16,976,523,360	84.64	20,014,400,000	90	20,014,400,000	90	85,019,306,360
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Sekolah terlayani	sekolah	12	12	4,637,800,000	12	5,634,453,000	12	7,063,423,360	13	7,100,000,000	13	7,100,000,000	13	31,535,676,360
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat	Jumlah Siswa SMK N 1 Muntok Terlayani	siswa	715	715	1,180,000,000	697	1,081,400,000	737	1,312,700,000	761	1,522,000,000	793	1,522,000,000	3703	6,618,100,000
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat	Jumlah siswa SMK N 1 Kelapa terlayani	siswa	551	551	911,600,000	586	900,000,000	577	1,022,000,000	650	1,300,000,000	682	1,300,000,000	3046	5,433,600,000
4	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Paritiga, Bangka Barat	Jumlah siswa SMK N 1 Parit tiga terlayani	siswa	687	687	1,121,200,000	639	1,105,600,000	757	1,211,200,000	703	1,406,000,000	735	1,406,000,000	3521	6,250,000,000
5	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat	Jumlah Siswa SMK N 1 Tempilang terlayani	siswa	268	268	439,600,000	332	429,600,000	345	525,000,000	396	792,000,000	428	792,000,000	1769	2,978,200,000
6	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat	Jumlah Siswa SMK N 1 Simpang Teritip Terlayani	siswa	64	64	246,000,000	128	326,420,000	315	504,000,000	256	512,000,000	288	512,000,000	1051	2,100,420,000
7	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat	Jumlah siswa SMA N 1 Jebus terlayani	siswa	625	625	898,000,000	626	902,200,000	691	967,400,000	690	1,242,000,000	722	1,242,000,000	3354	5,251,600,000
8	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	Jumlah siswa SMA N 1 Kelapa Terlayani	siswa	631	631	907,400,000	633	882,600,000	651	911,400,000	697	1,254,600,000	729	1,254,600,000	3341	5,210,600,000
9	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat	Jumlah siswa SMA N 1 Muntok terlayani	siswa	646	646	929,420,000	614	840,300,000	750	915,900,000	678	1,220,400,000	710	1,220,400,000	3398	5,126,420,000

10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat	Jumlah siswa SMA N 1 Parit Tiga terlayani	siswa	405	405	588,000,000	439	568,800,000	504	705,600,000	503	905,400,000	535	905,400,000	2386	3,673,200,000
11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat	Jumlah siswa SMA N 1 Simpang Teritip Terlayani	siswa	631	631	898,400,000	623	734,440,000	617	863,800,000	687	1,236,600,000	719	1,236,600,000	3277	4,969,840,000
12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Siswa SMA N 1 Tempilang terlayani	siswa	363	363	522,200,000	374	496,750,000	412	576,800,000	438	788,400,000	470	788,400,000	2057	3,172,550,000
13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok	Jumlah siswa SLB N Muntok terlayani	siswa	75	75	456,000,000	85	375,800,000	77	397,300,000	105	735,000,000	120	735,000,000	462	2,699,100,000
I	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	persen	76.61	76.61	26,921,510,000	79.29	30,412,850,000	81.97	33,343,240,000	84.64	38,832,200,000	90	38,832,200,000	90	168,342,000,000
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Jumlah sekolah terlayani	sekolah	27	27	12,059,040,000	28	14,851,180,000	29	15,714,760,000	29	15,800,000,000	29	15,800,000,000	29	74,224,980,000
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	Jumlah Siswa SMK N 1 Koba Terlayani	siswa	508	508	842,800,000	697	834,180,000	475	828,580,000	761	1,522,000,000	793	1,522,000,000	3234	5,549,560,000
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	Jumlah siswa SMK N 2 Koba terlayani	siswa	748	748	1,196,800,000	770	1,177,150,000	785	1,256,000,000	834	1,668,000,000	866	1,668,000,000	4003	6,965,950,000
4	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah	Jumlah Siswa SMK N 1 Simpang katis terlayani	siswa	751	751	1,234,600,000	792	1,196,800,000	763	1,220,800,000	856	1,712,000,000	888	1,712,000,000	4050	7,076,200,000

5	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah	Jumlah siswa SMK N 1 Pangkalan baru terlayani	siswa	864	864	1,382,400,000	900	1,317,950,000	844	1,350,400,000	900	1,800,000,000	900	1,800,000,000	4408	7,650,750,000
6	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah	Jumlah Siswa SMK N 1 Sungai Selan Terlayani	siswa	236	236	384,600,000	255	374,100,000	242	387,200,000	319	638,000,000	351	638,000,000	1403	2,421,900,000
7	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah siswa SMA N 1 Koba terlayani	siswa	658	658	944,200,000	694	900,400,000	665	931,000,000	758	1,364,400,000	790	1,364,400,000	3565	5,504,400,000
8	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah siswa SMA N 1 Lubuk Besar terlayani	siswa	421	421	589,400,000	454	549,960,000	476	666,400,000	518	932,400,000	550	932,400,000	2419	3,670,560,000
9	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah siswa SMA N 1 Namang terlayani	siswa	407	407	589,800,000	449	546,800,000	421	589,400,000	513	923,400,000	545	923,400,000	2335	3,572,800,000
10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah siswa SMA N 1 Pangkalan Baru terlayani	siswa	454	454	655,600,000	499	603,400,000	514	719,600,000	513	1,013,400,000	595	1,013,400,000	2575	4,005,400,000
11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah siswa SMA N 1 Sungaiselan	siswa	236	236	345,400,000	264	312,700,000	247	345,800,000	328	590,400,000	360	590,400,000	1435	2,184,700,000
12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah siswa SMA N 2 Sungaiselan terlayani	siswa	548	548	791,200,000	583	731,600,000	606	848,400,000	647	1,164,600,000	679	1,164,600,000	3063	4,700,400,000
13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	Jumlah Siswa SMA Laskar Pelangi Terlayani	siswa	64	64	1,022,070,000	96	2,275,410,000	48	3,600,000,000	160	2,060,000,000	160	2,060,000,000	528	11,017,480,000
14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Koba	Jumlah siswa SLB N Koba terlayani	siswa	72	72	442,000,000	70	351,800,000	80	400,000,000	90	630,000,000	100	630,000,000	412	2,453,800,000

15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan	Jumlah siswa SMK N 1 Toboali terlayani	siswa	715	715	1,188,000,000	787	1,094,100,000	713	1,140,800,000	915	1,830,000,000	947	1,830,000,000	4077	7,082,900,000
16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan	Jumlah siswa SMK N 1 Payung terlayani	siswa	342	342	552,200,000	345	537,800,000	359	574,400,000	409	854,000,000	441	854,000,000	1896	3,372,400,000
17	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan	Jumlah siswa SMK N 1 Pulau Besar Terlayani	siswa	89	89	250,000,000	121	274,350,000	102	273,150,000	185	370,000,000	217	370,000,000	714	1,537,500,000
18	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan	Jumlah siswa SMK N 1 Tukak Sadai terlayani	siswa	316	316	515,600,000	345	496,920,000	324	518,400,000	409	818,000,000	441	818,000,000	1835	3,166,920,000
19	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan	Jumlah siswa SMK N 1 Simpang Rimba terlayani	siswa	153	153	250,000,000	126	291,550,000	147	289,950,000	190	380,000,000	222	380,000,000	838	1,591,500,000
20	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Airgegas, Bangka Selatan	Jumlah Siswa SMK N 1 Air Gegas terlayani	siswa	325	325	525,000,000	406	557,200,000	317	552,400,000	470	940,000,000	502	940,000,000	2020	3,514,600,000
21	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SMA N 1 Air Gegas terlayani	siswa	584	584	827,600,000	614	798,000,000	317	792,800,000	678	1,220,400,000	710	1,220,400,000	2903	4,859,200,000
22	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SMA N 1 Lepar Pongok Terlayani	siswa	238	238	333,200,000	270	339,500,000	245	343,000,000	334	601,200,000	366	601,200,000	1453	2,218,100,000
23	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SMAN 1 Kep. Pongok terlayani	siswa	195	195	280,000,000	225	262,060,000	194	271,600,000	289	520,200,000	321	520,200,000	1224	1,854,060,000
24	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SMA N 1 Payung terlayani	siswa	596	596	834,400,000	621	764,375,000	608	851,200,000	685	1,233,000,000	717	1,233,000,000	3227	4,915,975,000

25	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SMA N 1 Pulau Besar terlayani	siswa	145	145	250,000,000	154	234,600,000	154	233,400,000	241	433,800,000	273	433,800,000	967	1,585,600,000
26	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SMA N 1 Simpang Rimba terlayani	siswa	397	397	564,800,000	428	504,600,000	414	579,600,000	492	885,600,000	524	885,600,000	2255	3,420,200,000
27	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SMA N 1 Toboali terlayani	siswa	873	873	1,222,200,000	900	1,159,175,700	880	1,232,000,000	900	1,620,000,000	900	1,620,000,000	4453	6,853,375,700
28	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SMA N 2 Toboali terlayani	siswa	476	476	673,000,000	510	707,622,000	473	705,222,000	574	1,033,200,000	606	1,033,200,000	2639	4,152,244,000
29	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SLB N Toboali terlayani	siswa	77	77	467,000,000	90	370,100,000	83	415,000,000	105	735,000,000	110	735,000,000	465	2,722,100,000
J	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitong dan Belitong Timur	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Belitong dan Belitong Timur	persen	76.61	76.61	23,035,240,000	79.29	23,494,749,500	81.97	30,883,974,040	84.64	36,532,200,000	90	36,532,200,000	90	150,478,363,540
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Belitong	Jumlah sekolah terlayani	sekolah	20	20	7,282,640,000	21	8,954,195,000	21	12,477,294,040	21	12,500,000,000	22	12,500,000,000	22	53,714,129,040
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitong	Jumlah siswa SMK N 1 Tanjungpandan terlayani	siswa	1073	1073	1,610,400,000	1100	1,543,987,500	868	1,576,860,000	1,100	2,200,000,000	1,100	2,200,000,000	5,241	9,131,247,500
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitong	Jumlah siswa SMK N 2 Tanjungpandan terlayani	siswa	770	770	1,263,300,000	802	1,179,537,500	800	1,398,300,000	866	1,732,000,000	866	1,732,000,000	4,104	7,305,137,500

4	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung	Jumlah siswa SMK N 3 Tanjungpandan terlayani	siswa	500	500	821,800,000	532	769,300,000	576	907,960,000	596	1,192,000,000	628	1,192,000,000	2,832	4,883,060,000
5	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung	Jumlah siswa SMK N Badau Terlayani	siswa	491	491	795,400,000	523	715,625,000	500	830,000,000	587	1,174,000,000	619	1,174,000,000	2,720	4,689,025,000
6	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung	Jumlah Siswa SMK N 1 Selat nasik Terlayani	siswa	132	132	256,000,000	164	282,240,000	165	264,000,000	228	456,000,000	260	456,000,000	949	1,714,240,000
7	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung	Jumlah siswa SMA N 1 Membalong terlayani	siswa	464	464	657,200,000	496	612,800,000	536	764,400,000	560	1,008,000,000	592	1,008,000,000	2,648	4,050,400,000
8	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	Jumlah siswa SMA N 1 Sijuk terlayani	siswa	475	475	681,600,000	507	627,300,000	507	729,400,000	571	1,027,800,000	603	1,027,800,000	2,663	4,093,900,000
9	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Jumlah siswa SMA N 1 Tanjungpandan terlayani	siswa	691	691	996,900,000	723	927,987,000	750	1,077,300,000	750	1,350,000,000	750	1,350,000,000	3,664	5,702,187,000
10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Jumlah siswa SMA N 2 Tanjungpandan terlayani	siswa	757	757	1,087,200,000	789	1,045,937,500	741	1,119,300,000	853	1,535,400,000	885	1,535,400,000	4,025	6,323,237,500
11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Jumlah siswa SLB N Tanjungpandan terlayani	siswa	131	131	447,000,000	140	383,500,000	150	734,600,000	160	800,000,000	170	800,000,000	751	3,165,100,000
12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur	Jumlah siswa SMK N 1 Manggar Terlayani	siswa	630	630	1,009,400,000	694	960,450,000	820	1,552,320,000	822	1,644,000,000	854	1,644,000,000	3,820	6,810,170,000
13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur	Jumlah siswa SMK N 1 Kelapa Kampit terlayani	siswa	509	509	824,800,000	541	788,960,000	525	904,240,000	605	1,210,000,000	637	1,210,000,000	2,817	4,938,000,000
14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur	Jumlah siswa SMK N 1 Dendang terlayani	siswa	138	138	828,000,000	170	639,180,000	220	731,860,000	234	1,638,000,000	266	1,638,000,000	1,028	5,475,040,000

15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggang, Belitung Timur	Jumlah siswa SMK N 1 Simpang Renggang terlayani	siswa	148	148	300,600,000	180	307,980,000	214	666,180,000	244	488,000,000	276	488,000,000	1,062	2,250,760,000
16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur	Jumlah siswa SMA N 1 Damar terlayani	siswa	323	323	464,600,000	355	439,960,000	375	714,000,000	419	754,200,000	451	754,200,000	1,923	3,126,960,000
17	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur	Jumlah siswa SMA N 1 Gantung terlayani	siswa	625	625	873,600,000	657	787,560,000	706	1,015,700,000	721	1,297,800,000	753	1,297,800,000	3,462	5,272,460,000
18	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur	Jumlah siswa SMA N 1 Kelapa kampit terlayani	siswa	434	434	629,800,000	466	576,640,000	470	699,300,000	530	954,000,000	562	954,000,000	2,462	3,813,740,000
19	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Jumlah siswa SMA N 1 Manggar terlayani	siswa	612	612	968,600,000	644	912,640,000	673	1,027,000,000	708	1,274,400,000	740	1,274,400,000	3,377	5,457,040,000
20	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur	Jumlah siswa SMA N 1 Simpang Pesak terlayani	siswa	461	461	658,400,000	493	605,030,000	500	769,460,000	557	1,002,600,000	589	1,002,600,000	2,600	4,038,090,000
21	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Jumlah siswa SLB N Manggar terlayani	siswa	94	94	578,000,000	110	433,940,000	102	537,300,000	130	910,000,000	140	910,000,000	576	3,369,240,000
22	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK N 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	Jumlah Siswa SMK N 1 Sijuk terlayani	siswa	0	0	0	0	0	159	387,200,000	192	384,000,000	256	384,000,000	607	1,155,200,000
						232,206,935,301		304,815,536,892		334,321,082,060		352,042,781,427		376,434,211,800		1,599,820,547,470

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dari tabel 6.2 diatas diketahui bahwa ada keterkaitan antara indikator kinerja SKPD dengan tujuan dan sasaran pada RPJMD. Tabel berikut menunjukkan keterkaitan antara kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 – 2022.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	APK Pendidikan Menengah	69,33%	76,49%	85,77%	89,67%	96,10%	100,85%	100,85%
2	APK SLB	37%	37%	38%	39%	41%	42%	42%
3	% SMA/SMK Terakreditasi A	32,50%	35,77%	40%	46,83%	53,17%	59,52%	59,52%
4	Rata-rata Nilai UN SMA dan SMK	6,2	6,3	6,5	6,8	7,0	7,3	7,3
5	% SLB Terakreditasi A	0%	30%	50%	80%	100%	100%	100%